KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH JAWA TIMUR

RESOR TUBAN



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KEPOLISIAN RESOR TUBAN

T.A. 2021

TUBAN, 15 JANUARI 2022

# Kata Pengantar

Laporan Kinerja Kepolisian Resor Tuban merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan tahun Kedua pelaksanaan Rencana Strategis Kepolisian Resor Tuban 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Kepolisian Resor Tuban mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015, tanggal 24 Juni 2015 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian Resor Tuban dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kepolisian Resor Tuban. Kinerja Polres Tuban diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepolisian Resor Tuban tahun 2021. Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kepolisian Resor Tuban Tahun 2021 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kepolisian Resor Tuban pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kepolisian Resor Tuban secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance dan Clean Government.*

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TUBAN

DARMAN, S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76051022

# DAFTAR TABEL

[Tabel 1. Indikator kinerja 26](#_Toc75423371)

[Tabel 2.Jumlah Bahabinkamtibmas Per Polsek 86](#_Toc75423372)

[Tabel 3. Poskamling aktif jajaran Polres Tuban 90](#_Toc75423373)

[Tabel 4. Crime Rate 93](#_Toc75423374)

[Tabel 5. Indikator tingkat kepuasan masyarakat 105](#_Toc75423375)

[Tabel 6. Jml. penanganan pengaduan SIwas 109](#_Toc75423376)

[Tabel 7. Penangan Dumas di Propam **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc75423377)

[Tabel 8. Jml penanganan pengaduan Di satreskrim **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc75423378)

[Tabel 9. % penyelesaian maslah hukum **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc75423379)2

[Tabel 10. Realisasi anggaran 69](#_Toc75423380)

[Tabel 11. Realisasi anggaran per jenis belanja 70](#_Toc75423381)

[Tabel 12. Realisasi anggaran per sumber dana 71](#_Toc75423382)

# DAFTAR GRAFIK

[Grafik 1. jumlah korban laka lantas MD 86](#_Toc75423469)

[Grafik 2. Jml kejadian Laka lantas 87](#_Toc75423470)

# DAFTAR ISI

[Kata Pengantar i](#_Toc107213185)

[DAFTAR TABEL ii](#_Toc107213186)

[DAFTAR GRAFIK iii](#_Toc107213187)

[DAFTAR ISI iv](#_Toc107213188)

[BAB I 1](#_Toc107213189)

[PENDAHULUAN 1](#_Toc107213190)

[A. Latar belakang 1](#_Toc107213191)

[B. Tugas Pokok dan Fungsi 3](#_Toc107213192)

[C. Struktur Organisasi Polres Tuban 5](#_Toc107213193)

[D. Sistematika 24](#_Toc107213195)

[BAB II 25](#_Toc107213196)

[PERENCANAAN KINERJA 25](#_Toc107213197)

[A. Rencana Strategis Polres Tuban 25](#_Toc107213198)

[1. Visi dan Misi Polres Tuban. 25](#_Toc107213199)

[2. Tujuan Jangka Menengah. 26](#_Toc107213200)

[3. Sasaran Startegis 26](#_Toc107213201)

[B. Perjanjian Kinerja Polres Tuban 26](#_Toc107213202)

[Target kinerja Polres Tuban Tahun 2020 - 2024 sebagai berikut : 28](#_Toc107213203)

[BAB III 30](#_Toc107213204)

[AKUNTABILITAS KINERJA 30](#_Toc107213205)

[A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 30](#_Toc107213206)

[BAB IV 72](#_Toc107213252)

[PENUTUP 72](#_Toc107213253)

[A. Kesimpulan 72](#_Toc107213254)

[B. Langkah Yang Harus Dilakukan untuk Meningkatkan Kinerjanya. 74](#_Toc107213255)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar belakang

Laporan Kinerja Kepolisian Resor Tuban merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2020. Laporan Kinerja ini merupakan tahun Pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kepolisian Resor Tuban 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Kepolisian Resor Tuban mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015, tanggal 24 Juni 2015 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian Resor Tuban dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kepolisian Resor Tuban. Kinerja Polres Tuban diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepolisian Resor Tuban tahun 2020.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target.

Berdasarkan .....

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kepolisian Resor Tuban Tahun 2020 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kepolisian Resor Tuban pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kepolisian Resor Tuban secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Di wilayah Polres Tuban terdapat beberapa aspek sasaran strategis serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi dalam mewujudkan target-target kinerja dengan Indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten diantaranya :

1. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dengan indikator :

* Indeks Harkamtibmas Polres Tuban.

1. Penegakkan Hukum secara Berkeadilan dengan indikator :

* Indeks Gakkum Polres Tuban.

1. Profesionalisme SDM Polres Tuban dengan indikator :

* Indeks Profesionalitas SDM Polres Tuban;

1. Modernisasi Teknologi dengan indikator :
2. Survey Kepuasan Penggunaan Jaringan Komunikasi Radio dan

Data;

1. Persentase terpenuhinya pengajuan dukungan almatsus Polri;
2. Persentase Counter Opini Negatif.
3. Sistem pengawasan Polres Tuban yang akuntabel guna mendukung tata Kelola pemerintah yang bersih dan melayani dengan indikator :
4. Nilai AKIP;
5. Nilai RBP;
6. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) di Polres Tuban;
7. Nilai kinerja anggaran;
8. Persentase penanganan pengaduan masyarakat;
9. Persentase Kemenangan dalam pemberian bantuan hukum

B. Tugas Pokok …..

## Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan fungsi Polri sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fungsi Kepolisian terdiri dari 2 dimensi yaitu dimensi yuridis dan sosiologis. Fungsi kepolisian pada dasarnya adalah fungsi penegakkan hukum yang melekat pada fungsi pemerintahan negara

dan dibentuk pula pertumbuhan/ perkembangan dalam tata kehidupan masyarakat itu sendiri. Fungsi Kepolisian dalam dimensi yuridis meliputi:

1. Fungsi Kepolisian Umum, yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan negara.
2. Fungsi Kepolisian khusus merupakan tugas administrasi khusus, sesuai dengan UU yang menjadi dasar hukumnya. Fungsi Kepolisian ini dapat dibedakan atas fungsi Kepolisian Yudikatif, yakni khusus untuk mengawasi/ menegakkan tindakan-tindakan administrasi.

Untuk Kepolisian dengan dimensi Sosiologis yaitu berupa rumusan fungsi kepolisian yang diemban oleh badan-badan yang secara swakarsa dibentuk dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat.

Memperhatikan kedudukan Polri sebagai alat negara, fungsi dan tujuan Polri serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tugas Polri, khususnya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, lingkup tugas Polri adalah:

1. pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/ pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. pelaksanaan …..

1. pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini;
2. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
3. pembinaan masyarakat, yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan satuan pengamanan, pemolisian masyarakat, serta pembinaan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
4. pelaksanaan fungsi Samapta Kepolisian, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, dan pengamanan objek vital serta bantuan satwa;
5. pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Struktur Organisasi Polres Tuban.

Dengan terus bergulirnya reformasi disegala bidang pada segenap lini birokrasi dan guna menjawab tantangan jaman, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia mereformasi diri dengan 3 (tiga) reformasi birokrasi Polri. Salah satunya adalah restrukturisasi, perubahan struktur organisasi yang mendasar yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Dari proses .....

Dari proses perubahan itu telah sampailah pada puncak Restrukturisasi Organisasi Polri dengan diterbitkannya Perkap nomor 2 tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja tingkat Kepolisian Resor yang saat ini masih dalam pelaksanaan dan penyesuaian.

Dari Perkap tersebut maka Struktur Organisasi Polres Tuban dapat disajikan sebagai berikut:

## Struktur Organisasi Polres Tuban

## 

## Untuk mengemban tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan Tata Kerja tersebut, sesuai Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor.

STRUKTUR ORGANISASI POLRES TUBAN

* 1. Unsur Pimpinan:
  2. Kapolres;

Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

* 1. Wakapolres;

Wakapolres berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres; memimpin Polres dalam batas kewenangannya,

apabila .....

apabila Kapolres berhalangan; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres berkaitan dengan tugas pokok Polres.

* + 1. Unsur Pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan:
  1. Bagops;

Bagian Operasi bertugas:

1. merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan manajemen operasi kepolisian, kegiatan
2. kepolisian terpadu, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah;
3. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama; dan
4. mengendalikan pengamanan markas.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Operasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan administrasi dan pelaksanaan operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu;
2. perencanaan pelaksanaan pelatihan praoperasi, termasuk kerja sama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu;
3. perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu, termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pelaporan data operasi dan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah;
4. pembinaan manajemen operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu yang meliputi perencanaan, pelaksanaan administrasi dan pengendalian operasi kepolisian, dan kegiatan kepolisian terpadu serta tindakan kontinjensi;
5. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan markas; dan

6)pengoordinasian .....

1. pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pemeritah/lembaga nonpemerintah tingkat kabupaten/kota serta melaksanakan monitoring dan evaluasinya.
   1. Bagren;

Bagian Perencanaan, bertugas menyusun perencanaan kebijakan teknis dan strategis, menyusun rencana kerja, melaksanakan dan mengendalikan program dan anggaran, menerapkan sistem manajemen organisasi dan tata laksana, serta melaksanakan program reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri dan logistik serta administrasi umum;
2. penyusunan rencana strategis, rancangan rencana kerja, rencana kerja, perjanjian kinerja, indikator kinerja utama, dan indikator kinerja kunci serta evaluasi kinerja;
3. penerapan sistem manajemen organisasi dan tata laksana;
4. pelaksana program reformasi birokrasi;
5. penyusunan rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk rencana kerja anggaran kementerian/lembaga, daftar isian pelaksanaan anggaran dan laporan kinerja instansi pemerintah; dan
6. pembuatan administrasi otorisasi anggaran, penyusunan laporan realisasi anggaran, sistem manajemen anggaran polri, hibah dan penyusunan revisi anggaran.
   1. Bag SDM;

Bagian Sumber Daya Manusia bertugas melaksanakan fungsi manajemen di bidang pembinaan sumber daya manusia, perawatan dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri pada Polri serta penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan.

Dalam .....

Dalam melaksanakan tugas Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan pembinaan karier pegawai negeri pada Polri, meliputi: usulan kenaikan pangkat dan ujian dinas kenaikan pangkat, pelaksanaan mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan yang menjadi lingkup kewenangan Polres;
2. pelaksanaan rekapitulasi dan evaluasi penilaian kinerja pegawai negeri pada Polri;
3. pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan pembinaan pegawai negeri pada Polri serta pelaksanaan administrasi sistem informasi personel Polri;
4. pembinaan rohani dan jasmani, pengusulan tanda kehormatan dan penghargaan bagi pegawai negeri pada Polri, dan penyelenggaraan administrasi pengakhiran dinas serta kesejarahan Polri;
5. pelaksanaan pembinaan psikologi personel, pemeriksaan psikologi bagi pemegang senjata api dan pelaksanaan konseling bagi pegawai negeri pada Polri yang bermasalah;
6. pelaksanaan penelitian administrasi dalam proses penerimaan anggota Polri; dan
7. penyelenggaraan pelatihan fungsi teknis kepolisian dan penyelenggaraan administrasi pegawai negeri pada Polri dalam mengikuti pendidikan pengembangan umum dan spesialisasi.
   1. Baglog;

Bagian Logistik bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen logistik yang meliputi pengadaan, pemeliharaan dan perawatan, persediaan barang, perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan konstruksi, serta angkutan.

Dalam .....

Dalam melaksanakan tugas Bagian Logistik menyelenggarakan fungsi:

* + - * 1. penyelenggaraan manajemen pengadaan barang/jasa;
        2. penyusunan rencana kebutuhan perbekalan, peralatan, pembangunan fasilitas dan konstruksi;
        3. pembangunan fasilitas dan konstruksi serta pengadaan materiil logistik sesuai program dan lingkup batas kewenangannya;
        4. perencanaan, pengadministrasian, dan pengelolaan barang milik negara serta keuangan;
        5. penyimpanan, pemeliharaan, perbaikan, dan pendistribusian materiil logistik serta perbekalan umum;
        6. penginventarisasian seluruh materiil logistik dan aset Polri dalam lingkungan Polres dan penghapusannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
        7. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Bagian Logistik.
  1. Siwas;

Seksi Pengawasan bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

1. pengawasan terhadap bidang pembinaan operasional atas aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian;
2. pengawasan untuk memberikan konsultasi dan sosialisasi;
3. pelaksanaan verifikasi;
4. penyelenggaraan analisis dan evaluasi atas hasil pelaksanaan pengawasan;
5. penanganan pengaduan masyarakat; dan

6)pendorong .....

1. pendorong penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan pelaksanaan pelaporan atas harta kekayanaan pengawai negeri pada Polri.
   1. Sipropam;

Seksi Profesi dan Pengamanan, bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pertanggungjawaban profesi, pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan pegawai negeri pada Polri, penelitian dan rehabilitasi personel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Profesi dan Pengamanan menyelenggarakan fungsi:

1. pelayanan, pengendalian dan pemantauan terhadap pengaduan masyarakat tentang penyimpangan sikap dan tindakan pegawai negeri pada Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi Polri;
2. pembinaan dan pengamanan internal yang meliputi personel, materiil, kegiatan dan bahan keterangan;
3. pembinaan dan penegakan disiplin dan/atau kode etik profesi Polri; dan
4. pembinaan profesi yang meliputi pembinaan etika profesi, audit investigasi kasus baik eksternal maupun internal dan penegakan etika profesi Polri.
   1. Sihumas

Seksi Hubungan Masyarakat, bertugas melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, memproduksi, mengelola informasi, penyajian data, dan dokumentasi kegiatan Polres yang dapat diakses oleh masyarakat.

Dalam .....

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

* + - * 1. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian di tingkat Polres;
        2. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
        3. penerangan kepada masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif;
        4. penerangan satuan dan pendistribusian informasi antar kesatuan; dan
        5. pengelolaan manajemen media dengan melakukan pemantauan media sosial dan media online, membuat produk kreatif dan melakukan diseminasi informasi digital kepolisian.
  1. Sikum;

Seksi Hukum, bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, turut serta dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. pelayanan bantuan hukum;
2. pemberian pendapat dan saran hukum; dan
3. penyuluhan, pembinaan hukum dan pengembangan hukum.
   1. Si TIK;

Seksi Teknologi Informasi Komunikasi, bertugas melaksanakan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam .....

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Teknologi Informasi Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

* + - * 1. pemeliharaan jaringan komunikasi kepolisian dan data, serta pelayanan telekomunikasi;
        2. pelayanan sistem informasi keamanan dan ketertiban masyarakat, meliputi penyiapan dan penyajian data operasional dan pembinaan;
        3. penyelenggaraan koordinasi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan satuan fungsi di lingkungan Polres.
  1. Sium;

Seksi Umum bertugas melaksanakan fungsi pelayanan dan pembinaan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Umum menyelenggarakan fungsi:

* + - * 1. pelayanan dan pembinaan administrasi umum dan ketatausahaan meliputi kesekretariatan, kearsipan dan perpustakaan serta pelayanan pembinaan naskah dinas meliputi penelitian konsep naskah dinas, registrasi naskah dinas, dan tata naskah; dan
        2. pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam di lingkungan Polres.
  1. Unsur Pelaksana tugas pokok:

1. SPKT;

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, bertugas memimpin dan mengendalikan dalam memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat

dan .....

dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan tugas kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu menyelenggarakan fungsi:

* + - * 1. pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk laporan Polisi, surat tanda terima laporan Polisi, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, surat keterangan tanda lapor kehilangan, surat keterangan catatan kepolisian, surat tanda terima pemberitahuan, surat keterangan lapor diri, surat izin keramaian dan kegiatan masyarakat lainnya, surat izin mengemudi, dan surat tanda nomor kendaraan bermotor;
        2. pengoordinasian dan pengendalian dalam pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain tindakan pertama di tempat kejadian perkara, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, dan pengamanan kegiatan masyarakat serta instansi pemerintah;
        3. pelayanan masyarakat melalui surat dan media komunikasi dan media sosial;
        4. pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
        5. penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolres melalui Bagian Operasi.

1. Satintelkam;

Satuan Intelijen Keamanan, bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen keamanan, mengumpulkan dan mengolah dan mendokumentasikan data serta pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan kegiatan

masyarakat .....

masyarakat lainnya, penerbitan surat keterangan catatan kepolisian, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.

Dalam melaksanakan tugas Satuan Intelijen Keamanan menyelenggarakan fungsi:

* + - * 1. pembinaan kegiatan intelijen keamanan;
        2. pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini, pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;
        3. pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal dan informal;
        4. pengumpulan, pengolahan dan pendokumentasian serta analisis terhadap perkembangan lingkungan strategik serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres;
        5. penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan; dan
        6. pelayanan surat izin untuk kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, surat tanda terima pemberitahuan, surat keterangan catatan kepolisian dan rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.

1. Satreskrim;

Satuan Reserse Kriminal bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil

Dalam .....

Dalam melaksanakan tugas Satuan Reserse Kriminal menyelenggarakan fungsi:

* 1. pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
  2. pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
  4. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Kriminal;
  5. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit Reserse Kriminal Polsek dan Satuan Reserse Kriminal Polres;
  6. pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil, baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

1. Satnarkoba;

Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya, bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya berikut prekursornya, serta

pembinaan .....

pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya.

Dalam melaksanakan tugas, Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya menyelenggarakan fungsi:

* 1. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya, dan prekursor;
  2. pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;
  3. pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya yang dilakukan oleh Unit Reserse Kriminal Polsek dan Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya Polres; dan
  4. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

1. Satbinmas;

Satuan Pembinaan Masyarakat, bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasannya, pembinaan kepolisian khusus, pemolisian masyarakat, serta pembinaan dan pengoordinasian Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Satuan Pembinaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1)pembinaan .....

1. pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat;
3. pembinaan ketertiban sosial, yang meliputi pembinaan pemuda, wanita, anak-anak, saka bhayangkara, pembinaan karakter masyarakat, penyandang masalah sosial dan kelompok masyarakat lainnya;
4. pembinaan teknis, pengoordinasian, dan pengawasan polisi khusus serta Satuan Pengamanan;
5. pemberdayaan kegiatan pemolisian masyarakat yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat; dan
6. peningkatan kemampuan dan profesionalisme serta pembinaan dan pengoordinasian Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
7. Satsamapta;

Satuan Samapta bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, tindakan pertama di tempat kejadian perkara, penanganan tindak pidana ringan, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengamanan markas serta bantuan Satwa.

Dalam melaksanakan tugas, Satuan Samapta menyelenggarakan fungsi:

1)pemberian .....

1. pemberian bimbingan, arahan, pelatihan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Satsamapta;
2. perawatan dan pemeliharaan peralatan Satsamapta;
3. pelaksanaan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan unjuk rasa, pengamanan objek vital, pengendalian massa, serta pencarian dan penyelamatan;
4. pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum terbatas, tindak pidana ringan dan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
5. pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan; danpemeliharaan, pelatihan dan penggunaan Polisi Satwa dalam mendukung tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
6. Satlantas;

Satuan Lalu Lintas, bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugas Satuan Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

* 1. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
  2. pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan analisis dan

evaluasi .....

evaluasi serta pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas;

* 1. penyelenggaraan pendidikan masyarakat lalu lintas, pengoperasionalan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta melaksanakan audit dan inspeksi di bidang lalu lintas;
  2. pelaksanaan penegakan hukum meliputi penyelidikan dan penyidikan lalu lintas, penanganan kecelakaan, pelanggaran lalu lintas dan tindakan pertama di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas;
  3. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
  4. penyelenggaraan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.

1. Sattahti.

Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti, bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya.

1. Dalam melaksanakan tugas, Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti menyelenggarakan fungsi:
2. pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib yang berkaitan dengan tahanan, yang meliputi pemeriksaan fasilitas ruang tahanan, jumlah dan kondisi tahanan beserta administrasinya;
3. pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan;
4. pengelolaan barang titipan milik tahanan; dan

5)pengamanan .....

1. pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya.
   1. Unsur pendukung:
2. Sikeu;

Seksi Keuangan, bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan verifikasi;
2. pembayaran gaji pegawai negeri pada Polri; dan penyusunan laporan sistem akuntansi instansi serta pertanggungjawaban keuangan.
3. Sidokkes;

Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian, bertugas melaksanakan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian sesuai lapis kemampuan yang meliputi pelayanan kedokteran kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian, menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya dan masyarakat umum pada poliklinik serta pelayanan kesehatan kesamaptaan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian menyelenggarakan fungsi:

* 1. pelaksanaan kegiatan operasional kedokteran forensik, *disaster victim investigation* dan kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat;

2) pelaksanaan .....

* 1. pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri dan keluarga serta masyarakat umum;
  2. pelaksanaan kegiatan kesehatan kesamaptaan bagi pegawai negeri pada Polri; dan
  3. penyiapan dan pemeliharaan materiil dan fasilitas kesehatan.
  4. Unsur Pelaksana tingkat Kewilayahan:

Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Polsek menyelenggarakan fungsi:

1. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini dan peringatan dini, dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan surat keterangan catatan kepolisian;
3. penyelenggaraan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan tindak pidana ringan serta pengamanan markas;

d. penyelenggaraan .....

1. penyelenggaraan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
2. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pemberdayaan peran serta masyarakat melalui pemolisian masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban sosial, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
4. penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan;
5. penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan; dan pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.

Polsek Jajaran Polres Tuban :

1. Polsek Tuban;
2. Polsek Palang;
3. Polsek Semanding;
4. Polsek Merakurak;
5. Polsek Jenu;
6. Polsek Tambakboyo;
7. Polsek Bancar;
8. Polsek Jatirogo
9. Polsek Kenduruan;
10. Polsek Widang;
11. Polsek Plumpang;
12. Polsek Rengel;
13. Polsek Soko;
14. Polsek Parengan;
15. Polsek Montong;
16. Polsek Kerek;
17. Polsek Singgahan;

18) Polsek Bangilan .....

1. Polsek Bangilan;
2. Polsek Senori;
3. Polsek Grabagan.

D. Sistematika .....

## Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Tuban Tahun 2021 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

BAB I : Menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued* ) yang sedang dihadapi;

BAB II : Perencanaan Kinerja, memuat tentang uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2021;

BAB III : Akuntabilitas Kinerja, memuat tentang Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran;

BAB IV : Penutup, memuat tentang uraian kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran-lampiran.

BAB II ….

# BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

## Rencana Strategis Polres Tuban

Rencana Strategis (Renstra) Polres Tuban tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Tahun 2021 adalah tahun kedua pelaksanaan Renstra Polres Tuban Tahun 2020-2024. Secara substantif Rencana Strategis Polres Tuban memuat visi dan misi, tujuan yang ingin dicapai, sasaran prioritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

### Visi dan Misi Polres Tuban.

1. Visi

“Terwujudnya keamanan dan Ketertiban di Seluruh daerah Hukum Polres Tuban.”

Makna Visi Polres Tuban:

Kabupaten Tuban menjadi wilayah yang aman dan tertib atas peran dan fungsi Polres Tuban.

1. Misi

“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat di Lingkungan Polres Tuban.”

Makna:

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya

yang.....

yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

### Tujuan Jangka Menengah.

1. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah hukum Polres Tuban.
2. Terwujudnya penegakan hukum secara berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Tuban.
3. Terwujudkan SDM Polres Tuban yang profesional.
4. Terwujudnya Modernisasi pelayanan Polres Tuban.
5. Terwujudnya manajemen Polres Tuban yang terintegrasi dan terpercaya.

### Sasaran Startegis

Mengacu kepada Sasaran Impact (SI) yaitu, “Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”, maka sasaran strategis Polres Tuban 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Penegakan Hukum Secara Berkeadilan.
3. Profesionalisme SDM Polres Tuban.
4. Modernisasi Teknologi Polres Tuban.
5. Sistem pengawasan Polres Tuban yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani.

## Perjanjian Kinerja Polres Tuban

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Surat.....

Surat Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/102/II/2006 tanggal 9 Februari 2006 tentang Buku Pedoman Penetapan Kinerja Tingkat Satker di lingkungan Polri. Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas

dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata, komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian baik keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi *(reward and punishment)*.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah:

1. Menentukan arah dan prioritas kinerja Satfung/Satker;
2. Mendorong tingkat pencapaian dan keberhasilan kinerja;
3. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan kinerja Satfung/Satker;
4. Mengevaluasi pencapaian kinerja Satfung/Satker dan organisasi Polri, serta dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada akhir tahun anggaran berjalan; dan menilai tingkat keberhasilan organisasi.

Polres Tuban telah membuat Penetapan Kinerja tahun 2021, kegiatan yang disusun dalam Penetapan Kinerja adalah kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satker Polres Tuban, penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi kinerja pada akhir tahun 2021. Penetapan kinerja Polres Tuban tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1…..

Tabel 1. Indikator kinerja

Target kinerja Polres Tuban Tahun 2020 - 2024 sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **IK IMPACT** | | | | | | | |
| **Stakehoulder** | | | | | | | |
|  | (SI) Kemanaan dan Ketertiban Kabupaten | (IKU Polres Tuban) Indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten | 3,14 | 3,46 | 3,37 | 3,42 | 3,41 |
| **IK UTAMA** | | | | | | | |
| **Internal Process** | | | | | | | |
| 1. | (SS1) Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | (IKU1) Indeks Harkamtibmas Polres Tuban | 67,77 | 69,73 | 72,11 | 74,12 | 76 |
| 2. | (SS2) Penegakkan Hukum secara Berkeadilan | (IKU2) Indeks Gakkum Polres Tuban | 62,99 | 68,70 | 69,29 | 69,85 | 62,98 |
| **IK PENUNJANG** | | | | | | | |
| **Innovation** | | | | | | | |
| 3. | (SS3) Profesionalisme SDM Polres Tuban | (IKP1) Indeks Profesionalitas SDM Polres Tuban | 39 | 44 | 44 | 44 | 52 |
| 4. | (SS4) Modernisasi Teknologi Polres Tuban | 1. (IKP3) Survey Kepuasan Penggunaan Jaringan Komunikasi Radio dan Data | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 1. (IKP4) Persentase Terpenuhinya Pengajuan Dukungan Almatsus Polri | 64% | 66% | 68% | 70% | 72% |
| 1. (IKP5) Persentase Counter Opini Negatif | 69% | 60% | 62% | 64% | 66% |
| 5. | (SS5) Terwujudnya tata kelola Polres Tuban yang bersih, terbuka dan melayani. | 1. (IKP6) Nilai AKIP | 68,86 | 68,87 | 68,97 | 68,98 | 69,00 |
| 1. (IKP7) Nilai RBP | 79,5 | 80,61 | 81,46 | 82 | 84 |
| 1. (IKP8) Indeks Kepuasan Layanan Polres Tuban | 97,02 | 97,22 | 97,42 | 97,62 | 97,82 |
| 1. (IKP9) Nilai Kinerja Anggaran | 97,52 | 97,72 | 97,92 | 98,12 | 98,32 |
| 1. (IKP10) Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat | 71,3% | 73,3% | 75,3% | 77,3% | 79,3% |
| 1. (IKP11) Persentase Kemenangan dalam pemberian bantuan hukum | 60% | 60,2% | 60,4% | 60,6% | 60,8% |

BAB III ….

# BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk mengetahui capaian kinerja Polres Tuban TA. 2021, maka perlu dilakukan pengukuran tingkat capaian kinerja. Pengukuran tingkat cpaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran dengan realisasi tingkat capaian kinerja. Target pencapaian indikator sasaran ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada awal tahun anggaran 2021. Upaya ini dilakukan guna meningkatkan akuntabilitas kinerja Polres Tuban.

## CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Polres Tuban dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing masing indikator kinerja setiap sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada lampiran tabel pengukuran kinerja Polres Tuban.

Dalam tahun 2021 secara umum ada beberapa target Indikator kinerja yang berhasil dicapai, namun masih ada beberapa target indikator kinerja yang belum optimal berhasil dicapai. Adapun terhadap target indikator yang belum berhasil dicapai, telah dilakukan analisa dan evaluasi untuk peningkatan capaian kinerja di masa yang akan datang.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam suatu organisasi harus memiliki indikator kinerja yang digunakan sebagai parameter untuk mengukur kinerjanya. Polres Tuban telah menetapkan Keputusan Kapolres Tuban Nomer : Kep/27/II/2021 tentang Penetapan Indikator kinerja Utama Renstra Polres Tuban T.A. 2020 – 2024. Capaian Indikator kinerja Utama (IKU) merupakan tolak ukur keberhasilan secara menyeluruh yang menggambarkan tugas Pokok dan fungsi serta peran yang diembannya, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Penunjang (IKP) yang dirumuskan. Sehingga dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang hasil yang telah dicapai.

Capaian.....

Capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana capaian kinerja (target) dengan realisasi capaian pada Perjanjian Kinerja (PK) Polres Tuban tahun 2021 sebagai berikut :

**Pengukuran Kinerja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **8** |
| **IK IMPACT** | | | | | |
|  | (SI) Kemanaan dan Ketertiban Kabupaten | (IKU Polres Tuban) Indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten | 3,46 | 2,72 | 79% |
| **IK UTAMA** | | | | | |
| 1. | (SS1) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat | (IKU1) Indeks Harkamtibmas Polres Tuban | 69,73 | 60,54 | 87% |
| 2. | (SS2) Penegakkan Hukum secara Berkeadilan | (IKU2) Indeks Gakkum Polres Tuban | 68,70 | 80,46 | 117% |
| **IK PENUNJANG** | | | | | |
| 3. | (SS3) Profesionalisme SDM Polres Tuban | (IKP1) Indeks Profesionalitas SDM Polres Tuban | 44 | 39 | 89% |
| 4. | (SS4) Modernisasi Teknologi Polres Tuban | 1. (IKP3) Survey Kepuasan Penggunaan Jaringan Komunikasi Radio dan Data | 72 | 76 | 106% |
| 1. (IKP4) Persentase Terpenuhinya Pengajuan Dukungan Almatsus Polri | 66% | 5,1% | 8% |
| 1. (IKP5) Persentase Counter Opini Negatif | 60% | 68,8% | 115% |
| 5. | (SS5) Terwujudnya tata kelola Polres Tuban yang bersih, terbuka dan melayani | 1. (IKP6) Nilai AKIP | 68,87 | 68,87 | 100% |
| 1. (IKP7) Nilai RBP | 80,61 | 96,5 | 120% |
| 1. (IKP8) Indeks Kepuasan Layanan Polres Tuban | 97,22 | 97,02 | 99,79% |
| 1. (IKP9) Nilai Kinerja Anggaran | 97,72 | 97,02 | 99% |
| 1. (IKP10) Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat | 73,3% | 80,0% | 109% |
| 1. (IKP11) Persentase Kemenangan dalam pemberian bantuan hukum | 60,2% | 0% | 0% |

1. Analisa Capaian Kinerja

Analisa Capaian Kinerja merupakan hasil rumusan dari pengukuran capaian kinerja, keberhasilan, kegagalan dan permasalahan serta hambatan/kendala yang dihadapi Tahun 2021 serta langkah/tindak lanjut yang akan diambil guna meningkatkan capaian kinerja Polres Tuban Tahun 2022.

Analisa Capaian kinerja dapat menggambarkan keberhasilan dalam mencapai target yang ditentukan dari hasil realisasi pelaksanaan tugas dilapangan sesuai tupoksi Polres Tuban, sehingga dapat terukur nilai keberhasilan kinerja Polres Tuban dan beberapa hambatan/kendala yang perlu dilakukan upaya peningkatan laporan kinerja pada tahun 2021.

Berdasarkan perjanjian kinerja Polres Tuban yang telah ditetapkan pada Tahun 2021, bahwa Polres Tuban memiliki 5 (lima) sasaran strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama serta 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Penunjang, yang harus dicapai guna mewujudkan kinerja Polres Tuban sebagai bagian dari sistem Pemerintahan yang berkewajiban melaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk mengetahui pencapaian visi dan misi serta tujuan, sasaran organisasi Pores Tuban sebagaimana tertuang dalam analisa dan penjabaran indikator kinerja utama dan penunjang sebagai berikut :

KEAMANAN DAN KETERTIBAN KABUPATEN

|  |  |
| --- | --- |
| KEAMANAN DAN KETERTIBAN KABUPATEN | INDEKS KEAMANAN DAN KETERTIBAN KABUPATEN |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | | REALISASI | | CAPAIAN | |
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| INDIKATOR IMPACT | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (SI) Keamanan dan ketertiban Kabupaten | (IKU Polres Tuban) Indeks keamanan dan ketertiban Kabupaten |  | 3,46 |  | 2,72 |  | 79% |

INDEKS KEAMANAN DAN KETERIBAN KABUPATEN (Score = Nilai x Bobot)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponen | Nilai | Satuan | Interpolasi | Bobot | Score Indeks (1 – 100 ) | Indeks Kamtibmas |
| Indeks Harkamtibmas | 3,22 | Nilai | + | 56,00% | 1,80 | 3,57 |
| Indeks Gakkum | 4,02 | Nilai | + | 44,00% | 1,77 |
| Total |  |  |  |  |  |

Adapun Indeks Keamanan dan Ketertban Kabupaten diperoleh dari score Indeks Harkamtibmas dan score Indeks Gakkum sebagaimana table berikut:

INDEKS HARKAMTIBMAS (Score Indexs = Nilai x Bobot%)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Komponen | Nilai | Satuan | Inter-polasi | Bobot | Score indeks  (1 – 100) | Indeks Harkam-tibmas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Road safety indeks | 3,69 | Nilai | + | 12,88% | 0,48 | 3,22 |
| 2 | Indeks community policing | 2,00 | Nilai | + | 14,43% | 0,29 |
| 3 | Response time kehadiran Polres Tuban di TKP | 3,53 | Nilai | + | 20,03% | 0,71 |
| 4 | Tingkat keamanan di jalur perairan Kab. Tuban | 1,50 | Nilai | + | 14,66% | 0,22 |
| 5 | Persentase penanganan potensi gangguan | 2,70 | Nilai | + | 14,05% | 0,38 |
| 6 | Crime Rate | 4,80 | Nilai | + | 23,95% | 1,15 |
| Total | |  |  |  | 100% |  |  |

INDEXS PENEGAKAN HUKUM (Score Indexs = Nilai x Bobot%)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Komponen | Nilai | Satuan | Inter-polasi | Bobot | Score indeks  (1 – 100) | Indeks Gakkum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Clearance Rate Kejahatan Konvensional | 4 | % | + | 19,23% | 0,77 | 4,02 |
| 2 | Clearance Rate Kajahatan Transnasional | 5,0 | % | + | 20,19% | 1,01 |
| 3 | Clearance Rate Kajahatan Kekayaan Negara | 5,0 | % | + | 21,42% | 1,07 |
| 4 | Clearance Rate Kajahatan Kontijensi | 4,56 | % | + | 10,37% | 0,47 |
| 5 | Persentase penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas | 5 | % | + | 18,76% | 0,94 |
| 6 | Persentase penyelesaian tindak pidana di jalur perairan | 5,0 | % | + | 9,51% | 0,48 |
|  | Total |  |  |  | 100% |  |  |

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

|  |  |
| --- | --- |
| SASARAN STRATEGIS  1 | PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | | REALISASI | | CAPAIAN | |
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| 1. | Indeks Harkamtibmas | 67.77 | 69,73 | 79.67 | 60,54 | 118% | 87% |

INDEKS HARKAMTIBMAS (Scor indexs = Nilai x Bobot x 20%)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Komponen | Nilai | Satuan | Inter-polasi | Bobot | Score indeks  (1 – 100) | Indeks Harkam-tibmas |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | *Road safety indeks* | 3,69 | angka | + | 12,88% | 0,48 | 64,38 |
| 2 | *Indeks community policing* | 2,00 | angka | + | 14,43% | 0,29 |
| 3 | Response time kehadiran Polres Tuban di TKP | 3,53 | angka | + | 20,03% | 0,71 |
| 4 | Tingkat keamanan di jalur perairan Kab. Tuban | 1,50 | % | + | 14,66% | 0,22 |
| 5 | Persentase penanganan potensi gangguan | 2,70 | % | + | 14,05% | 0,38 |
| 6 | Crime Rate | 4,80 | % | + | 23,95% | 1,15 |
|  | Total |  |  |  | 100% |  |

Data Realisasi Kinerja untuk Indikator Kinerja Road Safety Indeks tahun 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensi | No | Satfung | Variabel / Parameter untuk Perhitungan Indikator Kinerja | Data Pencapaian Kinerja | | | | |
| TW I | TW II | TW III | TW IV | JML |
| Harkam -tibmas | H1 | Lantas | x Index | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 3 |
| Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 jumlah penduduk (nilai x) | 2,92 | 4,17 | 4,01 | 3,51 | 14,61 |
| Jumlah total kematian akibat kecelakaan lalu lintas | 35 | 50 | 48 | 42 | 175 |
| Populasi penduduk | 1.198.012 | 1.198.012 | 1.198.012 | 1.198.012 | 1.198.012 |
| Index tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk (x Indek) | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | TH 2021 |
| 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 3,2 |
|  |  |  | y Index | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,2 |
| Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 10.000 jumlah kendaraan (nilai y) | 0,2 | 0,29 | 0,28 | 0,24 | 1,01 |
| Jumlah total kematian akibat kecelakaan lalu lintas | 35 | 50 | 48 | 42 | 175 |
| Jumlah kendaraan bermotor | 1.736.998 | 1.737.277 | 1.737.684 | 1.737.960 | 1.737.960 |
| Index tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 10.000 jumlah kendaraan bermotor (y Indek) | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | TH 2021 |
| 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,2 |

Rumus RSI :

;

RSI : *Road Safety Indeks*

X : Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk

Y : Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 10.000 kendaraan

M : Jumlah total kematian akibat kecelakaan lalu lintas dalam periode tertentu

P : Populasi penduduk di wilayah tertentu

K : Jumlah kendaraan bermotor di wilayah tertentu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Istimewa | X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | ≤ 5,0 |
| X indeks | 5 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 |  |  | 4,5 - 5 |
| Y | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0,7 | ≤ 0,7 |
| Y Indeks | 5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,57 | 4,5 | 4,5 - 5 |

Analisa kinerja untuk indikator kinerja road safety indeks:

* 1. Road safety indeks pada Tahun 2021, tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 jumlah penduduk (nilai x) menunjukkan tren yang stabil pd TW II s.d. TW IV berada pada level 4 dengan kategori istimewa. Untuk Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 10.000 jumlah kendaraan (nilai y) menunjukkan tren yang stabil pd TW I s.d. TW III berada pada level 5 dengan kategori istimewa dengan demikian secara keseluruhan road safety indek dapat dikatakan istimewa ;

b. Apabila .....

* 1. Apabila dibandingkan dengan target Road safety indeks pada Tahun 2021, mengalami kenaikan sebesar 167,73% dari target index konversi 2,2 terealisasi index konversi 3,6 sehingga tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas dapat pada tahun 2021 dapat ditekan, dengan kata lain bahwa tingkat keselamatan berlalu lintas di Kab. Tuban semakin membaik.
  2. Namun demikian Polres Tuban tetap berusaha dan berupaya untuk menekan jumlah laka lantas sehingga dapat meminimalisir jumlah korban meninggal dunia.

Kendala untuk indikator kinerja road safety indeks:

* + - * 1. Kurangnya etika & sopan santun masyarakat dalam berlalu lintas dijalan;
        2. Kurangnya sarana & prasarana jalan (lampu penerangan jalan masih kurang, jalan rusak/berlubang, tidak adanya rambu & marka yang jelas).

Upaya untuk indikator kinerja road safety indeks:

Menyelenggarakan Operasi bidang Kepolisian lalu lintas yang tematik untuk menurunkan jumlah laka lantas;

Menyelenggarakan Turjawali untuk meningkatkan Kamseltibcarlantas;

Melakukan kajian Blackspot dan Troubelspot kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan dan membangun komunitas di area tersebut;

Penanganan kecelakaan lalu lintas menonjol dengan pemanfaatan teknologi Traffic Accident Analysis (TAA).

Melanjutkan Program “Stop Pelanggaran Stop Kecelakaan dan Keselamatan Indonesia Tertib untuk Kemanusiaan dalam rangka mewujudkan budaya tertib lalu lintas;

f. Melaksanakan…..

Melaksanakan sosialisasi ditempat pelayanan masyarakat tentang etika berlalu lintas;

Tabel 1.b

Data Realisasi indeks Community Policing Tahun 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensi | No | Satfung | Variabel / Parameter untuk Perhitungan Indikator Kinerja | Data Pencapaian Kinerja | | | | |
| TW I | TW II | TW III | TW IV | JML |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harkam-tibmas** | **H2** | **Sat Binmas** | ***Indeks Community Policing*** |  |  |  |  | **40%** |
|  | **Persentase Bhabinkamtibmas terhadap desa** | **45%** | **47%** | **45%** | **46%** | **12%** |
| Jumlah Bhabin-kamtibmas yang resmi ditempatkan di satu desa berdasarkan surat Kapolda | 147 | 153 | 149 | 152 | 152 |
| Jumlah total Desa/kelurahan | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| **Persentase siskamling aktif** | **22%** | **23%** | **23%** | **23%** | **7%** |
| Total siskamling yang aktif di wilayah Kab. Tuban | 387 | 393 | 398 | 403 | 403 |
| Total siskamling yang terdaftar di Polres Tuban | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 |
| **Persentase Peningkatan Jumlah FKPM/Pokdar Kamtibmas** | **-7%** | **-23%** | **-39%** | **-46%** | **-11,46%** |
| Jumlah FKM Pokdar Kamtibmas 2021 perTW - Jumlah FKM Pokdar Kamtibmas 2020 | -23 | -73 | -125 | -148 | -148 |
| Jumlah FKM Pokdar Kamtibmas 2020 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| **Persentase Lembaga yang memiliki Polsus (20%)** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **20%** |
| Jumlah lembaga yang memiliki Polsus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jumlah lembaga yang seharusnya memiliki Polsus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Indikator kinerja | | | | Indeks  TW I | Indeks  TW II | Indeks  TW III | Indeks  TW IV | JML |
| H4 | Community Policing (konversi) | | |  |  |  |  | 1,6 |

Rumus Indikator Kinerja Community Policing :

ICP : Indeks Community Policing

X1 s.d. X4 : Komponen ICP

W1 s.d. W4 : Bobat masing – masing komponen

Rumus Persentase Bhabinkamtibmas terhadap desa terhadap desa (Bobot 25%)

Rumus Persentase Siskamling aktif (Bobot 30%)

Rumus Persentase Peningkatan jumlah FKPM/Pokdar Kamtibmas (Bobot 25%)

Rumus Persentase lembaga yang mempunyai Polsus (Bobot 20%)

Tabel Konversi nilai indikator Indeks Community Policing ke Indeks (skala 1-5) :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kinerja Level I | ICP | 0% | 4% | 9% | 13% | 17% | 22% | **26%** | 30% | 35% | 39% | > 40% |
| Indeks | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | **1,6** | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,0 - < 2,0 |

Analisa kinerja untuk Community Policing:

a. Pada Indikator persentase Bhabinkamtibmas terhadap desa jika dibandingkan target tahun 2020 sebesar 62% realisasi 97%, capaian 156% dan Tahun 2021 target 64% realisasi 46%, nilai capaian 72% terdapat penurunan secara kuantitas

dari …..

dari 317 personel ( dengan rincian 171 personel Bhabinkamtibmas definitif (Kep. Kapolres Tuban) dan 146 personel tugas perbantuan dari Polmas ), pada tahun 2021 menjadi 152 sehingga turun 52 %, sehingga terjadi perubahan jumlah personel (pengurangan sebanyak 42 personel) dari mutasi keluar Polres sebanyak 6 personel, meninggal dunia 8 personel, pensiun 28 personel, sehingga jumlah anggota Bhabinkamtibmas berkurang sebanyak 25 personel.

b. Pada Indikator Siskamling Aktif terdapat kenaikan jika dibandingkan antara Tahun 2020 target 15 % realisasi 16 % sehingga capaian 107 % dan Tahun 2021 target 20 % realisasi 23 % sehingga nilai capaian 115 % dari Jumlah Siskamling yang terdaftar 1.737 siskamling dan realisasi Siskamling Aktif 403 sehingga secara kuantitas masih jauh dari harapan;

c. Pada Indikator peningkatan jumlah FKPM/Pokdar Kamtibmas terdapat penurunan jika dibandingkan antara Tahun 2020 target 2,2 % realisasi 1.481 % sehingga capaian 67.318 % dan Tahun 2021 target 3,7 % realisasi 7 % sehingga nilai capaian 189 %, secara kwantitatif ada penurunan jumlah FKPM/Pokdar Kamtibmas sekitar 96% atau -96%;

d. Pada Indikator Lembaga yang memiliki Polsus terdapat kenaikan pada tahun 2020 sebanyak 3 Lembaga/Instansi yang memiliki Polsus realisasi 100 % menjadi 3 Lembaga/Instansi yang memiliki Polsus dari 3 Lembaga/Instansi yang memiliki Polsus, realisasi 100 % nilai capaian 100 %.

Kendala:

* 1. Pada Indikator Bhabinkamtibmas secara kuantitas terdapat penurunan dari 171 menjadi 152 disebabkan adanya mutasi keluar Polres sebanyak 6 personel, meninggal dunia 8 personel, pensiun 28 personel 1;
  2. Peran kepala desa dan masyarakat masih kurang aktif dalam menjaga siskamling dan perlu dilakukan pembinaan dan pendekatan kepada petugas poskamling dan perangkat desa ;

c. Untuk …..

* 1. Untuk pokdar kamtibmas sudah ada di desa, tetapi secara resmi masih belum dibentuk struktur organisasi di wilayah masing masing ;
  2. Belum seluruhnya Lembaga/Instansi yang memiliki Polsus sehingga secara kualitas masih kurang memahami tentang Polsus.

Upaya tindak lanjut

* 1. Pada Tahun 2022 secara kuantitas dan kualitas Bhabinkamtibmas akan ditingkatkan, sehingga seluruh Desa/Kelurahan dapat terpenuhi 1 Desa 1 Bhabinkamtibmas dan secara kualitas seluruh Bhabinkamtibmas dapat membina masyarakat di Desa/Kelurahan untuk menjaga Kamtibmas;
  2. Meningkatkan Binposkamling secara terpadu dengan aparat yang ada di Desa/Kelurahan sehingga dapat menciptakan situasi dilingkungannya menjadi aman dan tertib;
  3. Meningkatkan Bin Pokdar di seluruh Kabipaten Tuban dan memberdayakan Pokdar Kamtibmas yang ada untuk memberikan informasi kesadaran dalam menjaga keamanan dan ketertiban guna menciptakan rasa aman dilingkungan masyarakat;
  4. Melakukan monitoring dan evaluasi pada Lembaga/Instansi yang belum memiliki Polsus dan memberikan pemahaman tentang pentingnya memiliki Polsus untuk melaksanakan tugas-tugas Kepolisian dilingkungan Lembaga/Instansi pemerintah.

Tabel 1.f

Data Realisasi Respon Time kehadiran di TKP Tahun 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensi | No | Satfung | Variabel / Parameter untuk Perhitungan Indikator Kinerja | Data Pencapaian Kinerja | | | | |
| TW I | TW II | TW III | TW IV | JML |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Harkam  tibmas | H3 |  | ***Response time* kehadiran polisi di TKP** | 74% | 75% | 78% | 74% | 3,5 |
| -Samapta | Kejadian yang memenuhi Response Time | 523 | 560 | 670 | 560 | 2.313 |
| -Reskrim |
| -Lantas | Total seluruh kejadian | 703 | 749 | 863 | 761 | 3.076 |
| Indikator kinerja | | | | Indeks  TW I | Indeks  TW II | Indeks  TW III | Indeks  TW IV | 69% |
| H3 | Response time kehadiran polisi di TKP (Konversi) | | |  |  |  |  | 3,5 |

Rumus Indikator kinerja Respon time kehadiran Polisi di TKP

RT(n) = X 100%

(RT)\_(n) : Persentase respons time di masing – masing fungsi.

K : Kejadian yang memenuhi respons time.

T : Total seluruh kegiatan.

Tabel konversi nilai indicator respons time ke indeks (skala 1 – 5)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Memadai** | Response Time | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | **71%** | 73% | 75% | 77% | 79% | 60% - <80% |
| Indeks | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | **3,5** | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,0 - < 4.0 |

Analisa kinerja Response time kehadiran polisi di TKP sebagai berikut:

* + - * 1. Analisa

Adanya tren naik dan turun pada TW II & TW IV disebabkan karena banyaknya permintaan anggota untuk mendukung giat vaksinasi covid-19.

* + - * 1. Kendala

Kurangnya koordinasi antar petugas dilapangan dengan instansi terkait maupun masyarakat.

* + - * 1. Upaya

Memaksimalkan anggota yang ada dengan meningkatkan profesionalisme masing-masing anggota.

Data Realisasi Kinerja untuk Indikator Kinerja Tingkat keamanan

di jalur perairan Kab. Tuban tahun 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensi | No | Satfung | Variabel / Parameter untuk Perhitungan Indikator Kinerja | Data Pencapaian Kinerja | | | | |
| TW I | **TW II** | **TW III** | **TW IV** | **JML** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harkam - tibmas** | **H4** | **Unit Polairud** | **Tingkat keamanan di jalur perairan (Wilayah Kab. Tuban)** | **33** | **87** | **76** | **100** | **62,5** |
|  |  |  | Jumlah kasus tindak pidana di jalur perairan  (wilayah Kab. Tuban) | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 |
| Total durasi waktu kegiatan patroli (dalam jam) di jalur perairan (Wilayah Kab. Tuban) | 300 | 344 | 396 | 400 | 1440 |
| **Indikator kinerja** | | | | Indeks  TW I | Indeks TW II | Indeks  TW III | Indeks TW IV | Jumlah |
| **H4** | **Tingkat keamanan di jalur perairan (Wilayah Kab. Tuban)** | | |  |  |  |  | **1,5** |

Rumus tingkat keamanan di jalur perairan (wilayah Kab. Tuban) :

T = (K X 10.000) / D

Keterangan:

T : Tingkat keamanan di jalur perairan;

K : Jumlah kasus tindak pidana di jalur perairan;

D : Total durasi waktu patrol (dalam jam) di jalur perairan.

Tabel Konversi nilai indikator tingkat keamanan di jalur perairan (wilayah Kab. Tuban) (skala 1-5):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kinerja Level I | Tingkat Keamanan | 100,00 | 92,33 | 84,67 | 77,00 | 69,33 | **61,67** | 54,00 | 46,33 | 38,66 | 31,00 | >30 |
| Indeks | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | **1,5** | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,0 - < 2,0 |

Analisa kinerja untuk indikator tingkat keamanan dijalur perairan indeks :

a. Analisa kinerja untuk indikator tingkat keamanan dijalur perairan menunjukkan tren kenaikan pada TW III dibandingkan TW I dan TW II dengan demikian secara keseluruhan tingkat keamanan dijalur perairan berada di kinerja level 1;

b. Untuk diperhatikan bahwa total angka kejadian tindak pidana dijalur perairan masih cukup tinggi yakni 9 kasus.

Upaya tindak lanjut untuk menekan tingkat keamanan dijalur perairan sebagai berikut:

* + - 1. Melakukan peningkatan patroli di daerah perairan Kab. Tuban;
      2. Meningkatkan koordinasi/kerjasama dengan istansi terkait;
      3. Memberikan pembinaan masyarakat pesisir laut.

Kendala …..

Kendala/hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

Kurangnya jumlah Kapal Type B1 yang digunakan sebagai sarana patroli;

Perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi;

Data Realisasi Persentase Penurunan Potensi Gangguan Tahun 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensi | No | Satfung | Variabel / Parameter untuk Perhitungan Indikator Kinerja | Data Pencapaian Kinerja | | | | |
| TW I | TW II | TW III | TW IV | JML |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harkam-tibmas** | **H5** | **Satintel-kam** | **Persentase kemampuan reduksi potensi gangguan** | **40,4%** | **38,8%** | **35,2** | **25,9%** | **25,9%** |
|  |  |  | Proyeksi potensi gangguan untuk seluruh bidang | 171 | 338 | 489 | 665 | 665 |
|  |  |  | Jumlah kejadian nyata/menonjol gangguan untuk seluruh bidang | 102 | 207 | 317 | 493 | 493 |
| **Indikator kinerja** | | | | Indeks  TW I | Indeks  TW II | Indeks  TW III | Indeks  TW IV | 2,7 |
| **H5** | **Persentase penurunan potensi gangguan (konversi)** | | | **3,5** | **3,4** | **3,3** | **2,7** | 2,7 |

Rumus persentase penurunan potensi gangguan

PPG : Persentase kemampuan reduksi potensi gangguan.

PPG = (∑Gn - ∑ Rn) X 100%

∑Gn

∑Gn : Proyeksi potensi gangguan untuk seluruh bidang.

∑ Rn : Jumlah kejadian nyata/menonjol gangguan untuk

seluruh bidang.

Tabel konversi Nilai Indikator Penurunan Potensi Gangguan ke indeks (Skala 1- 5)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kinerja Level II | PPG | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 21% | 23% | **25%** | 27% | 29% | 10% - <30% |
| Indeks | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | **2,7** | 2,8 | 2,9 | 2,0 - < 3,0 |

Analisa …..

Analisa kinerja Persentase penurunan potensi gangguan :

Dari uraian data di atas, secara keseluruhan target persentase penurunan potensi gangguan Per Tahun Anggaran TA. 2021 dapat dicapai. Dari 665 potensi gangguan dapat diturunkan sebesar 493 atau sebesar 25,9%. Dalam analisa pelaksanaan per Triwulan mengalami sedikit kenaikan secara bertahap terhadap kegiatan masyarakat akibat penurunan level PPKM oleh pemerintah dalam penanganan Pandemi COVID-19 pada tahun 2021.

Kendala :

Belum terdukungnya transportasi (R4) unit opsnal masing – masing Unit.

Upaya tindak lanjut untuk Persentase penurunan potensi gangguan sebagai berikut:

1. Melakukan peningkatan kemampuan personel dengan mengikutsertakan dalam Dikjur/Dikbangpers/Pelatihan Personel secara berkesinambungan dan pelaksanaan Binlatkatpuan;
2. Meningkatkan kemampuan alut/alsus Intelkam;
3. Tetap aktif melaksanakan penggalangan perorangan seperti Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Daerah, BEM maupun penggalangan kelompok seperti Ormas, LSM, Perguruan Pencak Silat, Kelompok Buruh yang ada di wilayah Kabupaten Tuban guna terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.

**Data Realisasi *Crime Clearance* Tahun 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensi | No | Satfung | Variabel / Parameter untuk Perhitungan Indikator Kinerja | Data Pencapaian Kinerja | | | | |
| TW I | TW II | TW III | TW IV | JML |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indek Harkamtibmas** | **H6** | **Satreskrim** | ***Crime Clearance*** | 7,5 | 8,3 | 9,6 | 15,8 | 41,2 |
|  |  |  | Jumlah kasus kejahatan selama setahun di suatu wilayah hukum Polres per 100.000 jumlah penduduk | 90 | 99 | 115 | 189 | 493 |
| Jumlah penduduk di wilayah hukum Polres tersebut | 1.198.012 | 1.198.012 | 1.198.012 | 1.198.012 | 1.198.012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indikator kinerja** | | | | **Indeks**  **TW I** | **Indeks**  **TW II** | **Indeks**  **TW III** | **Indeks**  **TW IV** | **4,8** |
| **H6** | **Crime Clearance (konversi)** | | | **4,9** | **4,9** | **4,9** | **4,9** | **4,8** |

Rumus Indikator kinerja *Clearance rate* :

CRT =

CRT : Jumlah kasus kejahatan selama setahun per 100.000 penduduk dalam wilayah hukum suatu Polres

: Jumlah kasus kejahatan selama setahun di wilayah hukum Polres

: Jumlah penduduk di wilayah hukum Polres tersebut

Tabel Konversi nilai indikator *Crime Clearance*  ke Indeks (skala 1-5)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kinerja Level V | CRT | 100 | 80 | 60 | **40** | 20 | ≤ 100 |
|
| Indeks | 4,5 | 4,6 | 4,7 | **4,8** | 4,9 | 4,5 - 5,0 |

Analisa kinerja untuk indikator kinerja *Crime clearance*:

Dari uraian secara keseluruhan Crime clearance mengalami penurunan dari target 28,8 terealisasi 41,2 atau konversi indek dari target 4,9 tercapai 4,8 sama level kinerja V kalau dianalisis per triwulan mengalami dari TW I s.d. TW IV mengalami kenaikan.

Tindak lanjut untuk indikator Clearance rate kejahatan Konvensional sebagai berikut :

1. Ploting anggota terhadap daerah yang rawan kejadian kejahatan Tindak Pidana
2. Mendatangi dan berkoordiansi dengan Toga, Tomas terkait terjadinya Tindak Pidana.
3. Melakukan peningkatan kemampuan personel dengan mengikut sertakan Dikjur/Dikbangpers serta pelatihan personel secara berkesinambungan
4. Melakukan koordinasi dengan CJS ( Criminal Justice System)

Kendala.....

Kendala untuk indikator kinerja Clearance rate kejahatan Konvensional sebagai berikut :

1. Penugasan anggota Ditreskrimum secara mendadak/ penanganan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana.
2. Minimnya anggota dalam hal pelayanan masyarakat serta kemampuan SDM masing-masing anggota masih kurang

**INDEKS PENEGAKKAN HUKUM POLRES TUBAN**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **TARGET** | | **REALISASI** | | **CAPAIAN** | |
| **2020** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** |
| **Indeks Penegakkan hukum Polres Tuban** |  | **68,70** |  | **80,46** |  | **117%** |

**INDEXS PENEGAKAN HUKUM (score indexs = Nilai x Bobot x 20%)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Komponen** | **Nilai** | **Satuan** | **Inter-polasi** | **Bobot** | **Score indeks**  **(1 – 100)** | **Indeks Gakkum** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| * + - 1. **Clearance Rate Kejahatan Konvensional** |  | **%** | **+** | **19,23%** |  |  |
| * + - 1. **Clearance Rate kejahatan Transnasional** |  | **%** | **+** | **18,76%** |  |
| * + - 1. **Clearance Rate kejahatan kekayaan Negara** |  | **%** | **+** | **19,81%** |  |
| * + - 1. **Clearance Rate kejahatan Kontinjensi** |  | **%** | **+** | **13,60%** |  |
| * + - 1. **Persentase penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas** |  | **%** | **+** | **16,06%** |  |
| * + - 1. **Persentase penyelesaian tindak pidana di jalur perairan** |  | **%** | **+** | **12,55%** |  |
| **Total** |  |  |  | **100%** |  |

**Tabel 2.a**

**Data Realisasi *Crime Clearance* kejahatan *konvensional* Tahun 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dimensi** | **No** | **Satker** | **Indikator Kinerja dan Parameter untuk Perhitungan Indikator Kinerja** | **Data Pencapaian Kinerja** | | | | |
| **TW I** | **TW II** | **TW III** | **TW IV** | **JML** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gakkum Polres Tuban** | **G1** | **Satreskrim** | ***Crime Clearance* kejahatankonvensional** | 59% | 61% | 60% | 59% | 60% |
|  |  |  | Jumlah kasus atau peristiwa kejahatan konvensional yang selesai ditangani oleh Polres Tuban | 70 | 72 | 71 | 70 | 283 |
| Jumlah total kasus kejahatan konvensional yang terjadi | 118 | 118 | 119 | 118 | 473 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Indikator kinerja** | | | | **Indeks**  **TW I** | **Indeks**  **TW II** | **Indeks**  **TW III** | **Indeks**  **TW IV** |  |
| **G1** | ***Crime Clearance* kejahatankonvensional** | | | **3,9** | **4,04** | **4** | **3,9** | **4** |

Rumus Indikator kinerja *Crime Clearance* kejahatan *konvensional* :

Crime Clearance = X 100%

K : Jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang diselesaikan oleh Polisi.

T : Jumlah total kasus kejahatan (crime total) yang terjadi.

Tabel Konversi nilai indikator *Crime Clearance* ke Indeks (skala 1-5)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baik | CR | 60,00% | 61,56% | 63,11% | 64,67% | 66,22% | 67,78% | **69,33%** | 70,89% | 72,44% | 74,00% | 60% - <75% |
| Indeks | 4 | 4,04 | 4,09 | 4,13 | 4,18 | 4,22 | **4,26** | 4,31 | 4,35 | 4,4 | 4,0 - < 4.5 |

Analisa kinerja untuk indikator kinerja *Crime Clearance kejahatan konvensional* :

Dari uraian secara keseluruhan target persentase mengalami penurunan Crime Clearance kejahatan Konvensional pertahun dicapai dari target yang telah ditentukan meskipun dalam pelaksanaan per triwulan mengalami kenaikan maupun penurunan apabila di bandingkan dengan TW I, TW II dan TW III akibat mengalami penurunan aktifitas kegiatan Penyelidikan maupun penyidikan terkaid Covid -19 pada Tahun 2020 dan untuk TW IV juga mengalami penurunan.

Tindak lanjut.....

Tindak lanjut untuk indikator Crime Clearance kejahatan Konvensional sebagai berikut :

1. Ploting anggota terhadap daerah yang rawan kejadian kejahatan Tindak Pidana
2. Mendatangi dan berkoordiansi dengan Toga, Tomas terkait terjadinya Tindak Pidana.
3. Melakukan peningkatan kemampuan personel dengan mengikut sertakan Dikjur/Dikbangpers serta pelatihan personel secara berkesinambungan
4. Melakukan koordinasi dengan CJS ( Criminal Justice System)

Kendala untuk indikator kinerja Crime Clearance kejahatan Konvensional sebagai berikut :

1. Penugasan anggota Ditreskrimum secara mendadak/ penanganan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana.
2. Minimnya anggota dalam hal pelayanan masyarakat serta kemampuan SDM masing-masing anggota masih kurang
3. Belum terpenuhinya rasio antara personil polri dengan jumlah penduduk

Tabel 2.b

Data Realisasi *Crime* *Clearance* kejahatan *Transnasional* Tahun 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dimensi** | **No** | **Satker** | **Indikator Kinerja dan Parameter untuk Perhitungan Indikator Kinerja** | **Data Pencapaian Kinerja** | | | | |
| **TW I** | **TW II** | **TW III** | **TW IV** | **JML** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gakkum Polres Tuban** | **G2** | **Satresnarkoba** | ***Crime Clearance* kejahatan transnasional** | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  |  | Jumlah kasus atau peristiwa kejahatan transnasional yang selesai ditangani oleh Polri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah total kasus kejahatan transnasional yang terjadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Indikator kinerja** | | | | **Indeks**  **TW I** | **Indeks**  **TW II** | **Indeks**  **TW III** | **Indeks**  **TW IV** |  |
| **G2** | ***Crime Clearance* kejahatan transnasional (konversi)** | | | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |

Rumus Indikator kinerja *Crime Clearance* kejahatan *transnasional* :

Crime Clearance = X 100%

K : Jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang diselesaikan oleh Polisi.

T : Jumlah total kasus kejahatan (crime total) yang terjadi.

Tabel Konversi nilai indikator Clearance Rate ke Indeks (skala 1-5)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Istimewa | CR | 75,0% | 77,8% | 80,6% | 83,3% | 86,1% | 88,9% | 91,7% | 94,4% | 97,2% | **100,0%** | ≥75% |
| Indeks | 4,5 | 4,56 | 4,61 | 4,67 | 4,72 | 4,78 | 4,83 | 4,89 | 4,94 | **5** | 4,5 - 5 |

Analisa kinerja untuk *Crime Clearance* kejahatan *transnasional* sebagai berikut:

1. Dari uraian secara keseluruhan target kejahatan transnasional untuk Polres Tuban tidak menangani kejahatan tersebut.

Kendala untuk indikator Crime Clearance kejahatan Transnasional sebagai berikut :

1. Dengan tidak adanya kejahatan transnasional di Polres Tuban maka belum ditemukan kendala yang berarti ;

Tindak lanjut untuk indikator kinerja Crime Clearance kejahatan Transnasional adalah :

1. Tetap meningkatkan kemampuan anggota dalam penyidikan tindak pidana kejahatan transnasional

Tabel…..

Tabel 2.c

Data Realisasi Crime Clearance kejahatan terhadap kekayaan negara Tahun 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dimensi** | **No** | **Satker** | **Indikator Kinerja dan Parameter untuk Perhitungan Indikator Kinerja** | **Data Pencapaian Kinerja** | | | | |
| **TW I** | **TW II** | **TW III** | **TW IV** | **JML** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gakkum Polres Tuban** | **G3** | **Satreskrim** | ***Crime Clearance* kejahatan terhadap kekayaan negara** | **80%** | **100%** | **80%** | **100%** |  |
|  |  |  | Jumlah kasus atau peristiwa kejahatan terhadap kekayaan negara yang selesai ditangani oleh Polri | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 |
| Jumlah total kasus kejahatan kejahatan terhadap kekayaan negara yang terjadi | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| **Indikator kinerja** | | | | Indeks  TW I | Indeks  TW II | Indeks  TW III | Indeks  TW IV |  |
| **G3** | ***Crime Clearance k*ejahatan terhadap kekayaan negara (konversi**) | | | **4,61** | **5** | **4,61** | **5** |  |

Rumus Indikator kinerja *Crime Clearance* kejahatan terhadap kekayaan negara :

Crime Clearance = X 100%

K : Jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang diselesaikan oleh Polisi.

T : Jumlah total kasus kejahatan (crime total) yang terjadi.

Tabel Konversi nilai indikator Clearance Rate ke Indeks (skala 1-5)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Istimewa | CR | 75,0% | 77,8% | 80,6% | 83,3% | 86,1% | 88,9% | 91,7% | 94,4% | 97,2% | **100,0%** | ≥75% |
| Indeks | 4,5 | 4,56 | 4,61 | 4,67 | 4,72 | 4,78 | 4,83 | 4,89 | 4,94 | **5** | 4,5 - 5 |

Analisa .....

Analisa kinerja untuk indikator kinerja Crime Clearance kejahatan terhadap kekayaan negara:

Dari uraian diatas, secara keseluruhan persentase Clearance rate kejahatan terhadap kekayaan negara Tahun 2021, Target 94 %, realisasi 90 % sehingga capaian 96 %. Dalam pelaksanaan per Triwulan mengalami kanaikan maupun penurunan apabila dibandingkan dengan TW I, TW II, TW III dan TW IV, tetapi secara keseluruhan aktivitas kegiatan Penyelidikan maupun Penyidikan telah mencapai 96 %, berada di kinerja level baik ( nilai indeks sebesar 4,94 ).

a. Dari angka jumlah kasus atau peristiwa kejahatan terhadap kekayaan negara yang ditangani oleh Sat Reskrim Polres Tuban sebanyak 20 kasus dan berhasil diselesaikan 18 kasus sehingga capaian 96 %, ;

b. Kestabilan tindak pidana kejahatan terhadap kekayaan negara yang terjadi per Triwulan salah satunya juga dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal serta perkembangan lingkungan strategis di wilayah hukum Polres Tuban.

Keberhasilan pencapaian Crime Clearance kejahatan terhadap kekayaan Negara karena melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Adanya korporasi dalam tindak pidana korupsi, sehingga menambah jumlah penyelesaian perkara tindak pidana korupsi;

b. Adanya MOU antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kepolisian Daerah Jawa Timur, tentang koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggarakan Pemerintah Daerah;

c. Adanya…..

c. Adanya MOU antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara republic Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, tentang optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;

d. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait guna percepatan hasil audit Investigasi dan penghitungan kerugian keuangan Negara, dan APIP.

e. Melakukan koordinasi dengan auditor untuk mengetahui adanya kerugian keuangan Negara;

f. Melakukan pelatihan khusus kepada Penyidik tindak pidana korupsi khususnya tentang audit investigasi penghitungan kerugian;

g. Membuat rumusan standart operasional prosedur (SOP) tentang penanganan tindak pidana korupsi dengan mempedomani peraturan presiden (PP) No. 43/2018 tentang tatacara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;

h. Meningkatkan kemampuan Penyidik tindak pidana korupsi, melalui rangkaian kegiatan pelatihan dengan berbagai metode seperti diskusi, workshop, sosialisasi, mentorship dan metode pembelajaran lainnya;

i. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder untuk mendapatkan informasi;

Tindak lanjut untuk Crime Clearance kejahatan terhadap kekayaan Negara:

a. Melakukan MOU antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kepolisian Daerah Jawa Timur, tentang koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggarakan Pemerintah Daerah;

b. Melakukan…..

b. Melakukan MOU antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara republic Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, tentang optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;

c. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait guna percepatan hasil audit Investigasi dan penghitungan kerugian keuangan Negara, dan APIP.

d. Meningkatkan koordinasi dengan auditor untuk mengetahui adanya kerugian keuangan Negara;

e. Meningkatkan pelatihan khusus kepada Penyidik tindak pidana korupsi khususnya tentang audit investigasi penghitungan kerugian;

f. Meningkatkan rumusan standart operasional prosedur (SOP) tentang penanganan tindak pidana korupsi dengan mempedomani peraturan presiden (PP) No. 43/2018 tentang tatacara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;

g. Meningkatkan kemampuan Penyidik tindak pidana korupsi, melalui rangkaian kegiatan pelatihan dengan berbagai metode seperti diskusi, workshop, sosialisasi, mentorship dan metode pembelajaran lainnya;

h. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder untuk mendapatkan informasi;

Tabel 2.d

Data Realisasi Crime Clearance kejahatan implikasi kontinjensi Tahun 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dimensi** | **No** | **Satker** | **Indikator Kinerja dan Parameter untuk Perhitungan Indikator Kinerja** | **Data Pencapaian Kinerja** | | | | |
| **TW I** | **TW II** | **TW III** | **TW IV** | **JML** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gakkum Polres Tuban** | **G4** | **Satreskrim** | ***Crime Clearance* kejahatan implikasi kontijensi** | **0%** | **0%** | **0%** | **0%** | **0%** |
|  |  |  | Jumlah kasus atau peristiwa kejahatan implikasi kontijensi yang selesai ditangani oleh Polri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah total kasus kejahatan implikasi kontijensi yang terjadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Indikator kinerja** | | | | Indeks  TW I | Indeks  TW II | Indeks  TW III | Indeks  TW IV |  |
| **G4** | ***Crime Clearance* kejahatan implikasi kontijensi (konversi)** | | | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |

Rumus Indikator kinerja *Crime Clearance* kejahatan implikasi kontinjensi :

Crime Clearance = X 100%

K : Jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang diselesaikan oleh Polisi.

T : Jumlah total kasus kejahatan (crime total) yang terjadi.

Tabel Konversi nilai indikator *Crime Clearance* ke Indeks (skala 1-5)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Istimewa | CR | 75,0% | **77,8%** | 80,6% | 83,3% | 86,1% | 88,9% | 91,7% | 94,4% | 97,2% | 100,0% | ≥75% |
| Indeks | 4,5 | **4,56** | 4,61 | 4,67 | 4,72 | 4,78 | 4,83 | 4,89 | 4,94 | 5 | 4,5 - 5 |

Analisa kinerja untuk indikator kinerja *Crime Clearance* kejahatan implikasi kontinjensi sebagai berikut :

1. Dari uraian secara keseluruhan target kejahatan kontijensi untuk Polres Tuban tidak menangani kejahatan tersebut.

Tindak lanjut untuk indikator Crime Clearance kejahatan Kontinjensi sebagai berikut :

1. Tetap meningkatkan kemampuan anggota dalam penyidikan tindak pidana kejahatan kontijensi

Kendala.....

Kendala untuk indikator kinerja Crime Clearance kejahatan Kontijensi sebagai berikut :

1. Dengan tidak adanya kejahatan kontijensi di Polres Tuban maka belum ditemukan kendala yang berarti

Tabel 2.e

Data Realisasi persentase penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas Tahun 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dimensi** | **No** | **Satker** | **Indikator Kinerja dan Parameter untuk Perhitungan Indikator Kinerja** | **Data Pencapaian Kinerja** | | | | |
| **TW I** | **TW II** | **TW III** | **TW IV** | **JML** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gakkum Polres Tuban** | **G5** | **Satlantas** | **Persentase penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas** | **66%** | **59%** | **52%** | **22%** | **55%** |
| Jumlah perkara tindak pidana laka lantas yang diselesaikan oleh polisi | 110 | 141 | 86 | 16 | 353 |
|  |  |  | Jumlah total perkara tindak pidana laka lantas yang terjadi | 166 | 238 | 165 | 72 | 641 |
| **Indikator kinerja** | | | | Indeks  TW I | Indeks  TW II | Indeks  TW III | Indeks  TW IV |  |
| **G5** | **persentase penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas (konversi)** | | | **4,18** | **3,9** | **3,2** | **1,8** | **3,5** |

Rumus Indikator kinerja persentase penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas :

R : Persentase penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas

K : Jumlah perkara tindak pidana laka lantas yang diselesaikan oleh polisi.

T : Jumlah total perkara tindak pidana laka lantas yang terjadi.

R = X 100%

Tabel Konversi nilai indikator penyelesaian perkara laka lantas ke Indeks (skala 1-5)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Istimewa | SELRA LAKA | **75%** | 78% | 81% | 83% | 86% | 89% | 92% | 95% | 97% | 100% | ≥75% |
| Indeks | **4,5** | 4,56 | 4,61 | 4,67 | 4,72 | 4,78 | 4,83 | 4,89 | 4,94 | 5,00 | 4,5 - 5 |

Analisa kinerja untuk indikator kinerja persentase penyelesaian perkara tindak pidana

laka lantas sebagai berikut :

Tidak tercapai tepat waktu dengan target yang di tentukan;

Memberikan batas waktu penyelesaian tindak pidana laka lantas.

Tindak ....

Tindak Lanjut untuk indikator kinerja persentase penyelesaian perkara tindak pidana

laka lantas sebagai berikut :

a. Mendatangi terperiksa tersangka dan korban di rumah sakit dan melakukan pemeriksaan di rumah sakit;

b. Mendatangi saksi.

Kendala/hambatan untuk indikator kinerja persentase penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas sebagai berikut :

Tersangka atau korban masih sakit dan masih belom bisa memberikan keterangan;

Rumah saksi di luar kota;

Keterbatasan personil;

Minimnya saksi;

Belum ada pernyataan para pihak.

Tabel 2.f

Data Realisasi Persentase penyelesaian tindak pidana

di jalur perairan Indonesia Tahun 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dimensi** | **No.** | **Satker** | **Indikator Kinerja dan Parameter untuk Perhitungan Indikator Kinerja** | **Data Pencapaian Kinerja** | | | | |
| **TW I** | **TW II** | **TW III** | **TW IV** | **JML** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gakkum Polres Tuban** | **G6** | **Unit Polairud** | **Persentase penyelesaian tindak pidana di jalur perairan Kab. Tuban.** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
|  |  |  | Jumlah kasus atau peristiwa kejahatan di jalur perairan Indonesia yang diselesaikan oleh Polairud. | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Jumlah total kasus kejahatan yang terjadi di jalur perairan Kab. Tuban. | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator kinerja** | | **Indeks**  **TW I** | **Indeks**  **TW II** | **Indeks**  **TW III** | **Indeks**  **TW IV** |  |
| **G6** | **Persentase penyelesaian tindak pidana di jalur perairan Kab. Tuban (konversi)** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** |

Rumus .....

Rumus Indikator kinerja persentase penyelesaian tindak pidana di jalur perairan Indonesia

P : Persentase penyelesaian tindak pidana di jalur perairan Indonesia.

K : Jumlah kasus atau peristiwa kejahatan di jalur perairan Indonesia yang diselesaikan.

T : Jumlah total kasus kejahatan yang terjadi di jalur perairan Indonesia.

P = X 100%

Analisa kinerja untuk indikator kinerja Persentase penyelesaian tindak pidana di jalur perairan Indonesia sebagai berikut:

Pada TW I sampai dengan TW IV jumlah kasus serta penyelesaian tindak pidana di jalur perairan oleh Polri mengalami penurunan jumlah lapor tetapi diikuti kestabilan dalam hal penanganan kasus tindak pidana di jalur perairan oleh anggota Polri yaitu 100 % ;

Tindak Lanjut untuk indikator kinerja Persentase penyelesaian tindak pidana di jalur perairan Indonesia sebagai berikut:

* + - 1. Melakukan peningkatan kegiatan penyelidikan;
      2. Meningkatkan kerjasama gabungan penyelidikan dengan instansi samping.

Kendala/hambatan untuk indikator kinerja Persentase penyelesaian tindak pidana di jalur perairan Indonesia sebagai berikut:

Penyidik dan penyidik pembantu belum mempunyai sertifikasi penyidik dikarenakan dibawah Baharkam Polri bukan dibawah Bareskrim Polri.

**INDIKATOR …..**

**INDIKATOR KINERJA PENUNJANG :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SASARAN STRATEGIS**  **3** | | **Profesionalisme SDM Polres Tuban** | | | | | | |
| **NO** | **INDIKATOR KINERJA PENUNJANG** | | **TARGET** | | **REALISASI** | | **CAPAIAN** | |
| **2020** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** |
| 1. | Indeks profesionalitas SDM Polres Tuban | |  | **44** |  | **39** |  | **89%** |

* + - 1. **Indeks profesionalitas SDM Polres Tuban**;

Tabel 3.a.1

Realisasi dan capaian kinerja indeks profesionalitas SDM Polres Tuban Tahun 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR KINERJA PENUNJANG** | **TARGET** | **REALISASI** | **CAPAIAN** |
| **Indeks profesionalitas SDM Polres Tuban**; | 44 | 39 | 89% |

Tabel 3.a.2

Data profesionalitas SDM Polres Tuban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | | | | |  |  |  |  |
| Dimensi | No | Indikator Kinerja | Data Pencapaian Kinerja  Tahun 2021 | | | | | | JML |
| dan Parameter untuk Perhitungan | TW I | TW II | TW III | | TW IV | |
| Indikator Kinerja |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | P1 | **Indeks profesionalitas SDM Polres Tuban** |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **Rekruitmen Betah 2021** |  |  |  | |  | |  |
|  |  | - Jumlah realisasi penerimaan |  |  | 59 | |  | |  |
| - Jumlah target kebutuhan pers pertahun | 595 | 604 | 610 | | 703 | |  |
|  |  | **Nilai rata-rata SMK Polres Tuban** | 79 |  |  | |  | |  |
| Jumlah personel Polres Tuban 2021 | 828 | 819 | 812 | | 807 | |
| * 1. Sangat baik (81-100) |  |  |  | | 119 | |
| * 1. Baik (71-80) |  |  |  | | 694 | |
| * 1. Cukup (61-75) | 0 |  |  | |  | |
| * 1. Sedang (61-70) | 0 |  |  | |  | |
| * 1. Buruk (0-50) | 0 |  |  | |  | |
| **Nilai rata-rata PPK PNS Polres Tuban** |  |  |  | |  | |  |
| Jumlah personel PNS : **33** |  |  |  | |  | |
| * + - * 1. Sangat baik (91-99) |  |  |  | | 33 | |
| * + - * 1. Baik (76-90) |  |  |  | |  | |
| * + - * 1. Cukup (61-75) |  |  |  | |  | |
| * + - * 1. Sedang (51-60) |  |  |  | |  | |
| * + - * 1. Buruk (0-50) |  |  |  | |  | |
|  |  | **Uji Kompetensi jumlah Pers yang mengikuti** |  | | | | | |  |
|  |  | **Tahun 2021** |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **Persentase pemberian reward kepada personel berprestasi** |  | | | | | |  |
|  |  | Kenaikan gaji berkala | 192 | 2 | | 25 | | 76 |  |
|  |  | Kenaikan pangkat | 102 |  | | 44 | |  |  |
|  |  | Reward Kapolda Jatim |  |  | |  | | 4 |  |
|  |  | Reward Kapolres Tuban |  |  | |  | | 135 |  |
|  |  | Tanhor |  |  | |  | | 48 |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |

Tabel 3.a.3

Capaian Target Indeks profesionalitas SDM Polres Tuban

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Indikator** | **Nilai** | **Skala** | **Bobot** | **Score Indeks** | Indeks profesionalitas SDM Polres Tuban |
| **Rekruitmen Betah** | Persentase pelaksanaan rekruitmen dengan prinsip BETAH dan proaktif (25%) | 5,9% | 1 | 25% | 0,25 | **39** |
| **Kopetensi** | Persentase uji kompetensi jabatan (40%) | 8,9% | 1 | 40% | 0,4 |  |
| **Kinerja** | Nilai rata-rata SMK Polres Tuban | 77,8 | 4 | 25% | 1 |
| Nilai rata-rata PPK PNS Polres Tuban (5%) | 84,4 | 5 | 5% | 0,25 |
| **Reward** | Persentase pemberian reward kepada personel berprestasi (5%) | 0,5% | 1 | 5% | 0,05 |
|  |  |  |  | **Total** | **1,95** |

|  |  |
| --- | --- |
| SASARAN STRATEGIS  4 | Modernisasi Teknologi Polres Tuban |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **INDIKATOR KINERJA PENUNJANG** | **TARGET** | | **REALISASI** | | **CAPAIAN** | |
| **2020** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** |
| 1. | Survey kepuasan penggunaan jaringan Komunikasi Radio dan data ; | 76% | **77** | 87,15% | **90,33** | 114,7% | **117,31** |
| 2. | Persentase terpenuhinya pengajuan dukungan Almatsus Polri; | 75% | **77%** | 58,21% | **149,6%** | 77,7% | **194,28%** |
| 3. | Persentase Counter opini negatif. | 55% | **58%** | 79% | **170%** | 143,6% | **293,10%** |

1. **Survey kepuasan penggunaan jaringan Komunikasi Radio dan data;**

Tabel 4.a

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR KINERJA PENUNJANG** | **TARGET** | **REALISASI** | **CAPAIAN** |
| Survey kepuasan penggunaan jaringan Komunikasi Radio dan data; | 89,5% | 76% | 84,9% |

Tabel 4 .....

Tabel 4.a.1

Data kepuasan penggunaan jaringan Komunikasi Radio dan data Tahun 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensi | No | Indikator Kinerja | Data Pencapaian Kinerja Tahun 2021 | | | | JML |
| dan Parameter untuk Perhitungan | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| Indikator Kinerja |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P3 | **Survey kepuasan penggunaan jaringan komunikasi Radio dan data** | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 |
|  |  |
|  |  | Survey Tahun 2021 | 74,6% | 78,7% | 83% | 87,1% | 80,7% |

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai survei kepuasan penggunaan jaringan komunikasi radio dan data pada TW I tahun 2021 dihitung sebagai berikut :

Rumus : Jumlah nilai jawaban perorangan : Jumlah nilai jika semua sangat baik X 100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRIWULAN I** | | | | |
| NO. | Nilai kode | Jumlah Penjawab | Angka | JP X NA |
| 1. | Sangat baik | 15 | 9 | 135 |
| 2. | Baik | 4 | 8 | 32 |
| 3. | Cukup | 2 | 7 | 14 |
| 4. | Kurang | 0 | 6 | 0 |
| 5. | Sangat kurang | 0 | 5 | 0 |
|  | **JUMLAH** | 21 |  | 181 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRIWULAN II** | | | | |
| NO. | Nilai Kode | Jumlah Penjawab | Angka | JP X NA |
| 1. | Sangat baik | 16 | 9 | 144 |
| 2. | Baik | 4 | 8 | 32 |
| 3. | Cukup | 1 | 7 | 7 |
| 4. | Kurang | 0 | 6 | 0 |
| 5. | Sangat kurang | 0 | 5 | 0 |
|  | **JUMLAH** | 21 |  | 183 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRIWULAN III** | | | | |
| No. | Nilai Kode | Jumlah Penjawab | Angka | JP X NA |
| 1. | Sangat baik | 17 | 9 | 153 |
| 2. | Baik | 4 | 8 | 32 |
| 3. | Cukup | 0 | 7 | 0 |
| 4. | Kurang | 0 | 6 | 0 |
| 5. | Sangat kurang | 0 | 5 | 0 |
|  | **JUMLAH** | 21 |  | 185 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRIWULAN IV** | | | | |
| No. | Nilai Kode | Jumlah Penjawab | Angka | JP X NA |
| 1. | Sangat baik | 18 | 9 | 162 |
| 2. | Baik | 3 | 8 | 24 |
| 3. | Cukup | 0 | 7 | 0 |
| 4. | Kurang | 0 | 6 | 0 |
| 5. | Sangat kurang | 0 | 5 | 0 |
|  | **JUMLAH** | 21 |  | 186 |

c) Analisa ….

c) Analisa kinerja untuk indikator tingkat kepuasan penggunaan jaringan komunikasi radio dan data pada TW II menunjukkan penurunan, hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan yaitu:

(1) Sering terjadi pencurian kabel grounding atau penangkal petir, sehingga site/tower rawan terkena petir sehingga merusak perangkat yang berada dalam shelter.

(2) Masih terdapat Polsek yang belum bisa terjangkau oleh kabel FO;

(3) Tidak adanya cadangan peralatan jaringan komunikasi radio sehingga apabila rusak teknisi harus melakukan perbaikan dengan cara meng-kanibal dengan peralatan lainnya, dengan maksud supaya peralatan tersebut dapat digunakan dengan baik.

Upaya tindak lanjut untuk meningkatkan layanan jaringan komunikasi radio dan data Polres Tuban dan Polres jajaran sebagai berikut:

(1) Melakukan perbaikan terhadap site-site yang rusak;

(2) Menambah wifi id di MaPolres Tuban dan Polres jajaran;

(3) Menambah repeater link di daerah-daerah yang blank spot;

(4) Memperbaiki MCU yang rusak guna optimalisasi peralatan video conference;

(5) Berkoordinasi dengan PT. Telkom dalam rangka optimalisasi layanan jaringan data.

1. **Persentase terpenuhinya pengajuan dukungan Almatsus Polri;**

Tabel 4.b

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR KINERJA PENUNJANG** | **TARGET** | **REALISASI** | **CAPAIAN** |
| Persentase terpenuhinya pengajuan dukungan Almatsus Polri; | 66% | 5,1% | 7,7% |

Tabel …..

Tabel 4.b.1

Data terpenuhinya pengajuan dukungan Almatsus Polri

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |  |
| Dimensi | No | Indikator Kinerja | Data Pencapaian Kinerja  Tahun 2021 | | | | JML |
| dan Parameter untuk Perhitungan | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| Indikator Kinerja |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P4 | **Persentase terpenuhinya pengajuan dukungan almatsus Polri** | PENGAJUAN ALMATSUS POLRES TUBAN DIBUAT PER TAHUN | | | | |
|  |  | - Jumlah pengajuan dukungan almatsus Polres Tuban yang dipenuhi |
|  |  | - Jumlah seluruh pengajuan almatsus Polres Tuban |
|  |  |  |

Persentase realisasi penerimaan almatsus Polres Tuban pada tahun 2021 belum mencapai target dari total pengajuan sebagaimana table dan analisis diatas, sehingga perlunya adanya peningkatan di tahun berikutnya.

Analisa…..

Analisa kinerja untuk terpenuhinya pengajuan dukungan Almatsus Polri adalah sebagai berikut:

Untuk jenis almatsus teknologi dan komunikasi dari berbagai jenis peralatan dengan target ajuan sebesar 66% telah terealisasi sebesar 5,1% .

1. **Persentase Counter opini negatif**

Tabel 4.c

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR KINERJA PENUNJANG** | **TARGET** | **REALISASI** | **CAPAIAN** |
| Persentase Counter opini negatif; | 60% | 63% | 105% |

Tabel 4.c.1

Data Counter opini negatif Tahun 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | | |  |  |  |  |
| Dimensi | No | Indikator Kinerja | Data Pencapaian Kinerja Tahun 2021 | | | | JML | |
| dan Parameter untuk Perhitungan | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| Indikator Kinerja |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | P5 | **Persentase Counter Opini Negatif** | 57% | 64% | 71% | 61% | 63% | |
|  |  | - Jumlah total opini negatif yang di Caunter R | 16 | 14 | 15 | 11 | 56 | |
|  |  | - Jumlah total opini negatif T | 28 | 22 | 21 | 18 | 89 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |

Analisa kinerja untuk indicator kinerja counter opini negative sebagai berikut:

Indikator kinerja counter opini negative yang ditargetkan 60 % terealisasi 63% melebihi target sehingga capaian kinerjanya adalah 105 % menunjukan Bidhumas Polres Tuban telah melakukan counter opini terhadap pemberitaan yang berdampak negative;

Bidhumas Polres Tuban telah melakukan counter berita-berita atau isu-isu negative Yang beredar di masyarakat sehingga mencegah penyebaran informasi palsu atau hoaks tentang Polri;

c. Segala ……

Segala bentuk opini negative yang sangat berpengaruh pada segala aspek kehidupan masyarakat di wilayah Polres Tuban, dapat dikendalikan sihumas Polres Tuban.

Kendala / hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

* + - 1. Kurangnya SDM yang profesional dalam mengemban tugas fungsi kehumasan;
      2. Kurangnya sarana/prasarana untuk mendukung Tupoksi Bidhumas Polres Tuban.

Upaya tindak lanjut:

* + - 1. Dilaksanakan upaya peningkatan profesionalisme anggota Bidhumas Polres Tuban melalui pelatihan kemampuan sesuai dengan Tupoksinya;
      2. Meningkatkan sarana / prasarana untuk mendukung Tupoksi Bidhumas Polres Tuban.

|  |  |
| --- | --- |
| \SASARAN STRATEGIS  5 | Terwujudnya tata kelola Polres Tuban yang bersih terbuka dan melayani. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **INDIKATOR KINERJA PENUNJANG** | **TARGET** | | **REALISASI** | | **CAPAIAN** | |
| **2020** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** |
| 1. | Nilai AKIP; | NIHIL | **68,5%** | NIHIL | **68,87%** | NIHIL | **100,5%** |
| 2. | Nilai RBP; | NIHIL | **80%** | NIHIL | **80,61%** | NIHIL | **100,8%** |
| 3. | Indeks Kepuasan Layanan Polres Tuban; | NIIHIL | **97,22 %** | NIHIL | **97,02%** | NIHIL | **99,8%** |
| 4. | Nilai Kinerja Anggaran; | NIHIL | **97,72%** | NIHIL | **96,92%** | NIHIL | **99,2%** |
| 5. | Pengaduan Masyarakat; | NIHIL | **73,3%** | NIHIL | **84,4%** | NIHIL | **110%** |
| 6. | Persentase Kemenangan dalam pemberian bantuan hukum; | NIHIL | **60%** | NIHIL | **0%** | NIHIL | **0%** |

1. **Nilai AKIP**

Tabel 5.a

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR KINERJA PENUNJANG** | **TARGET** | **REALISASI** | **CAPAIAN** |
| Nilai AKIP | 68,5% | 68,87% | 100,5% |

Tabel…..

Tabel 5.a.1

Data Nilai AKIP Tahun 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | | |  |  |  |  |
| Dimensi | No | Indikator Kinerja  dan Parameter untuk Perhitungan  Indikator Kinerja | Data Pencapaian Kinerja  Tahun 2021 | | | | JML | |
| TW I | TW II | TW III | TW IV |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  | P6 | **Nilai AKIP** |  |  |  |  |  | |
|  |  | - Nilai Tahun 2020 | NIHIL | | | |  | |
|  |  | - Nilai Tahun 2021 | 68,87% | | | | | |

Belum dapat di analisa mengingat penilaian AKIP tahun 2021 belum ada dari Itwasum Polri

Tabel 5.b

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR KINERJA PENUNJANG** | **TARGET** | **REALISASI** | **CAPAIAN** |
| Nilai RBP; | 80% | 80,61% | 100,8% |

Tabel 5.b.1

Data Nilai RBP Tahun 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |
| Dimensi | No | Indikator Kinerja  dan Parameter untuk Perhitungan  Indikator Kinerja | Data Pencapaian Kinerja  Tahun 2021 | | | | | JML |
| TW I | TW II | TW III | TW IV | |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | P7 | **Nilai RBP** |  |  |  |  | |  |
|  |  | - Nilai RBP Tahun 2021 | 80,61% | | | | | 80,61% |

**3. Indeks Kepuasan Layanan Polres Tuban**

Tabel 5.c

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR KINERJA PENUNJANG** | **TARGET** | **REALISASI** | **CAPAIAN** |
| Indeks Kepuasan Layanan Polres Tuban; | 97,22% | 97,02% | 99,8% |

4. Nilai.....

**4. Nilai Kinerja Anggaran**

Tabel 5 d

Realisasi dan capaian tahun 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR KINERJA PENUNJANG** | **TARGET** | **REALISASI** | **CAPAIAN** |
| Nilai Kinerja Anggaran; | 94,2 | 98,42 | 104,47% |

**REKAP NILAI CAPAIAN KINERJA T.A. 2021 POLRES TUBAN PADA APLIKASI SMART**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |
| **RANGKING POLRI** | | **RANGKING POLDA** | **Kode Satuan Kerja** | | **Satuan Kerja** | | **Penyerapan** | | **Konsistensi** | | | **CRO** | | | **Efisiensi** | **Nilai Efisiensi** | **Kinerja** |
| 380 | | 51 | 644395 | | POLRES TUBAN | | 100 | | 99,88 | | | 100 | | | 17,52 | 93,81 | 98,21 |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  |  |

**5. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Tabel 5.e

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR KINERJA PENUNJANG** | **TARGET** | **REALISASI** | **CAPAIAN** |
| Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat | 73,3% | 84,4% | 110% |

**6. Persentase Kemenangan dalam pemberian bantuan hukum**

Tabel 5.f

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR KINERJA PENUNJANG** | **TARGET** | **REALISASI** | **CAPAIAN** |
| Persentase Kemenangan dalam pemberian bantuan hukum | 60% | 0% | 0% |

B, Realisasi ......

## Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran T.A. 2021

1. Per Program :

Tabel 2. Realisasi anggaran

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | PROGRAM | PAGU | REALISASI | % | SISA |
| 1 | 060.01 BI. Program Penyelidikan dan Penyidikan | 3.487.567.000 | 3.487.567.000 | 100 | 0 |
| 2 | 060.01 BP. Program Modernisasi Almatsus dan Sarpras | 8.993.366.000 | 8.993.365.077 | 100 | 923 |
| 3 | 060.01 BQ. Program Harkamtibmas | 12.545.314.000 | 12.545.313.370 | 100 | 630 |
| 4 | 060.01 WA. Program Dukungan Menejemen | 68.684.864.000 | 68.684.132.903 | 100 | 731.097 |
|  | JUMLAH | 93.711.111.000 | 93.710.378.350 | 100 | 732.650 |

Evaluasi realisasi anggaran per program dengan penjelasan sebagai berikut:

1. 060.01 BI. Program Penyelidikan dan Penyidikan

Realisasi anggaran Program lidik sidik Tahun 2021 mencapai 100 %, penyerapan anggaran sudah dilakukan sesuai kebutuhan.

1. 060.01 BP. Program Modernisasi Almatsus dan Sarpras

Realisasi anggaran Program Sarpras Tahun 2021 sudah mencapai 100 % penyerapan anggaran sudah dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

1. 060.01 BQ. Program Harkamtibmas Realisasi anggaran Program Harkamtibmas Tahun 2021 mencapai 100 % penyerapan anggaran sudah dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
2. 060.01 WA. Program Dukungan Menejemen

Realisasi anggaran Program Dukjemen Tahun 2021 mencapai 100 % penyerapan anggaran sudah dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

2. Per .....

1. Per Jenis Belanja :

Tabel 3. Realisasi anggaran per jenis belanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | JENIS BELANJA | PAGU | REALISASI | % | SISA |
| 1 | BEL. PEGAWAI | 68.371.093.000 | 68.370.361.903 | 100,00 | 731.097 |
| 2 | BEL. BARANG | 24.800.417.000 | 24.800.415.447 | 100,00 | 1.553 |
| 3 | BEL. MODAL | 539.601.000 | 539.601.000 | 100,00 | - |
|  | JUMLAH | 93.711.111.000 | 93.710.378.350 | 100,00 | 732.650 |

Evaluasi realisasi anggaran per jenis belanja anggaran dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai:

Secara umum penyerapan anggaran belanja pegawai T.A. 2021 tidak ada kendala dan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

1. Belanja Barang:

Secara rutin belanja barang Polres Tuban telah dilakukan giat anev Bag, Sat, dan sie serta Polsek jajaran Polres Tuban untuk mengevaluasi penyerapan anggaran T.A.2021 sehingga dapat diambil langkah langkah berikutnya agar penyerapan anggaran tetap bisa berjalan maksimal.

Belanja barang Polres Tuban terdapat refocussing anggaran untuk penanganan covid-19.

1. Belanja Modal:

Belanja modal Polres Tuban Secara umum penyerapan anggaran belanja pegawai T.A. 2021 tidak ada kendala dan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku dapat terealisasi 100 %

3. Per.....

3. Per Sumber Dana :

Tabel 4. Realisasi anggaran per sumber dana

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | SUMBER DANA | PAGU | REALISASI | % | SISA |
| 1 | RM | 87.722.066.000 | 87.721.333.350 | 100 | 732.650 |
| 2 | PNBP | 5.989.045.000 | 5.989.045.000 | 100 | 0 |
|  | JUMLAH | 93.711.111.000 | 93.710.378.350 | 100 | 732.650 |

Evaluasi realisasi anggaran per sumber anggaran dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Sumber Anggaran Rupiah Murni:
   1. Sumber anggaran Rupiah murni secara berkala telah dilakukan evaluasi untuk mengetahui capaian penyerapan anggaran dan capaian kinerja kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan selama tahun 2021 hasil dari anev akan dijadikan pedoman bagi sub satker untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan anggaran di bulan-bulan berikutnya.
   2. terdapat refocussing anggaran untuk penanganan covid-19 namun secara umum tidak mempengaruhi kinerja kegiatan dan anggaran.
2. Sumber Anggaran PNBP:

Secara rutin sumber anggaran PNBP sudah dilakukan penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan terdapat refocussing anggaran untuk penanganan covid-19 namun secara umum tidak mempengaruhi kinerja kegiatan dan anggaran.

1. Sumber Anggaran BLU:

Polres Tuban Tidak Terdapat anggaran BLU

1. Sumber Anggaran HIBAH:
2. Polres Tuban T.A. 2021 tidak terdapat anggaran hibah.

BAB IV…..

# BAB IV

# PENUTUP

## Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Polres Tuban tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditentukan dengan membandingkan target kinerja dan capaian kinerja tahun 2021, dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 secara umum sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, adapun keberhasilan maupun kendala serta kesimpulan dari pelaksanaan tersebut antara lain :

1. Pada tahun 2021 Dumas yang ditangani Polres Tuban 6 kasus seluruhnya sapat diselesaikan secara keseluruhan tercapapai 100 % jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebanyak 9 kasus terselesaikan 9 kasus tercapai 100% sejalan dengan Progam Kapolres Tuban dalam rangka pembangunan Zona Integritas diharapkan masyarakat ikut berkontribusi dalam memberikan pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan Polres Tuban dan tidak segan segan untuk melaporkan oknum anggota Polres Tuban yang melanggar sebagai upaya Polres Tuban memberikan pelayanan Prima Kepolisian;
2. Persepsi kepuasan masyarakat Pada Unit Unit Pelayanan Publik Tahun 2021 menunjukan tingkat keberhasilan yang memadahi semua unit unit pelayanan masih bisa memberikan pelayanan yang terbaik sesuai standar pelayanan Prima;
3. Pada Tahun 2021 hampir seluruh perjanjian kenerja yang telah disepakati oleh Bag, Sat, Sie dan polsek jajaran dapat dilaksanakan dengan baik sehingga kinerja Polres Tuban menjadi semakin baik.
4. Clearance rate kejahatan konvensional dan kejahatan lainnya pada prinsipnya dapat tercapai secara keseluruhan dari target, namun untuk kejahatan konvensional dari kasus yang dilaporkan sebanyak

473 kasus.....

473 kasus hanya dapat diselesaikan 283 kasus, disebabkan pada tahun 2021 Polres Tuban lebih mengedepan penyelesaian secara restorative justice;

1. Penurunan jumlah laka lantas pada tahun 2021 dari 802 pada tahun 2020 pada tahun 2021 terjadi laka lantas sebanyak 641 kejadian sehingga turun 161 kejadian atau turun 20,07%, penurunan jumlah kejadian laka lantas disebabkan pelaksanaan patroli Satlantas baik Polres maupun Polsek serta Satsabhara dilaksanakan secara masiv. Pada tahun 2021 Polres Tuban berhasil menurunkan tingkat fatalitas korban meningggal dunia dengan nilai RSI (Road Safety Index) sebesar 3,69 jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sehingga kinerja dari satuan lalu lintas Polres Tuban dapat dilaksanakan secara maksimal, penempatan anggota disimpul simpul jalan pada waktu jam sibuk dan patroli secara rutin dan berkesinambungan sangat efektif untuk menurunkan laka lantas dan fatalitas korban meninggal dunia, mengingat jalur patura kabupaten Tuban sangat padat dengan kondisi jalan yang kurang memadahi sehingga rawan terjadinya laka lantas.
2. Dukungan anggaran yang dialokasikan pada prinsipnya telah dapat memenuhi kebutuhan untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, namun demikian masih perlu dilaksanakan Anev secara intensif dan berkala.
3. Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 21 tanggal 14 Januari 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polres dan Polsek belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara optimal karena terbatasnya personel. Dengan keterbatasan personel tersebut perlu diupayakan kebijakan tersendiri sehingga prinsip Polsek kuat dan Polres Besar dapat didukung dengan jumlah personel yang memadai. Disarankan sesuai dengan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan diperlukan jumlah personel yang memadai sesuai dengan Analisa Beban Kerja dan memiliki kompetensi di bidangnya.
4. Untuk meningkatkan profesionalisme personel, kiranya alokasi jumlah peserta pendidikan kejuruan (Dikjur) untuk Bintara khususnya bidang Operasional perlu ditingkatkan sehingga dapat menjawab tantangan

masa....

masa depan terkait dengan tuntutan pelayanan, perlindungan dan pengayoman serta kemampuan dalam penindakan hukum yang terukur dan proporsional sehingga masyarakat akan memberikan penilaian yang positif terhadap hasil kinerja kepolisian khususnya Polres Tuban.

## Langkah Yang Harus Dilakukan untuk Meningkatkan Kinerjanya.

Dalam beberapa aspek kegiatan yang telah disimpulkan terdapat hambatan maupun permasalahan di atas maka untuk menindaklanjuti beberapa aspek kegiatan tersebut yang dirasa masih kurang dan perlu dapat perhatian antara lain:

1. Terkait dengan tingginya kejadian kasus penggelapan, penipuan, pelecehan seksual anak dibawah umur serta curanmor dan curat diharapkan peranan Babinkamtibmas untuk dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk untuk berhati-hati dalam mengawasi putra putinya dan tidak mudah percaya kepada orang lain serta masyarakat diharapkan bisa mengamankan harta bendanya berhati-hati dalam menjalankan aktivitasnya.
2. Berkaitan dengan pelanggaran anggota maka Unit Propam dan Seksi pengawasan dan fungsi pembinaan Sumber Daya Manusia akan mengambil langkah-langkah seperti pemeriksaan anggota secara intensif dan berkala, Binrohtal dan penindakan yang tegas bagi anggota yang melanggar dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan pelanggarannya.
3. Dalam Rangka pencapain target Kinerja tahun 2021 Polres Tuban telah bersinergi dengan istansi terkait baik vertikal maupun horizontal serta pembinaan dari fungsi satuan atas (Polres Tuban) melalui supervisi memberikan dampak yang positif dalam pencapaian target kinerja dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menciptakan situasi yang aman dan koundusif juga mempunyai peran penting,sehingga rata-rata secara umum target kinerja tahun 2020 Polres Tuban dapat tercapai. Sinergi tersebut diatas akan tetap dilakukan pada tahun tahun mendatang sehingga keberhasilan Polres Tuban adalah keberhasilan seluruh masyarakat Tuban dan Polri pada umumnya.

Demikian…..

Demikian LKIP Polres Tuban T.A 2021 telah selesai disusun, kiranya dapat digunakan sebagai bahan introspeksi untuk peningkatan pelaksanaan tugas dalam Rencana Kerja T.A 2021 dan sebagai bahan Pimpinan untuk tindakan selanjutnya.

Tuban, 15 Januari 2022

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TUBAN

DARMAN S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76051022